PEMERINTAH PROVIBNSI RIAU

PERUBAHAN RENCANA STATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2019 - 2024

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

2022

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2019 – 2024

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dipindai dengan CamScanner

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2022

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 30

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkah dan rahmat-Nya setelah melalui proses pembahasan dalam rapat Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019-2024 telah menyelesaikan tugasnya.

Maksud dan tujuan dari Perubahan Renstra yang dibuat pada tahun 2022 ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus cepat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi dan mengikuti kebutuhan organisasi. Dimana perubahan dilakukan dengan maksud agar indikator yang disusun dalam Perubahan Renstra menjadi lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bounded).

Begitu pentingnya Perubahan Rencana Strategis ini, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil. Kami mengharapkan kehadiran buku ini dapat bermanfaat khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di Provinsi Riau, baik dukungan secara administratif, teknis, maupun keahlian di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan untuk terlaksananya penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, wassalammualaikum wr.wb.

Pekanbaru, 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

M. JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19750528 199412 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 19

2.2.1 Sumber Daya Manusia 19

2.2.2 Sumber Daya Aset 20

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Pendanaan 25

2.3.2 Kinerja Pendidikan Terhadap Indikator RPJMD 50

2.3.3 Indikator Kinerja Terhadap Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 65

2.3.4 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) 68

2.3.5 Suistanable Development Goals (SDG's) 70

2.3.6 Revitalisasi SMK 76

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 77

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan 78

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan 78

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 80

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 81

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 84

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 99

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 100

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 101

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 105

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .. 108

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 138

BAB VIII PENUTUP..... 143

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.2.	Kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tahun 2021(Termasuk Guru PNS)	20
2.3.	Data Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021	20
2.4	Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021	21
2.5	Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021	22
2.6	Rekapitulasi Asset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau	24
2.7.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau	26
2.7.b	Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau	27
2.8.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau	29
2.8.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020	34
2.9	APK SMA/SMK/MA Provinsi Riau	52
2.10	APM SMA/SMK/MA Provinsi Riau	53
2.11	Persentase Anak Tidak Sekolah Jenjang SMA/Sederajat Provinsi Riau Tahun 2019-2020	55
2.12	Angka Pastisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018-2020	55
2.13	Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK di Provinsi Riau Tahun 2016-2020.	56
2.14	Persentase Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020	57
2.15	Rasio Guru dengan Murid dan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA di Provinsi Riau Tahun 2016-2020	59

2.16	Rasio Guru dengan Murid Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019/2020	60
2.17	Perkembangan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	62
2.18	Jumlah SLB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020	64
2.19	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Provinsi Riau Tahun 2018-2020	65
2.20	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	65
2.21	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Akses Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2020	66
2.22	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B Provinsi Riau Tahun 2019-2020	66
2.23	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Riau Tahun 2019-2020.....	67
2.24	Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Riau Tahun 2019-2020.....	67
2.25	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Mengajukan Perizinan Terlayani Provinsi Riau Tahun 2018-2020.....	67
2.26	SPM Pendidikan Menengah.....	68
2.27	SPM Pendidikan Khusus.....	68
2.28	SPM Pendidikan.....	69
2.29	Rincian Kondisi Indikator SDGs Urusan Pendidikan.....	70
2.30	Kondisi Revitalisasi SMK di Provinsi Riau Tahun 2020.....	77
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	80
3.2	Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pelayanan Pendidikan Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	82

3.3	Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Pelayanan Pendidikan Yang Dapat Mempengaruhi Sasaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi	86
3.4	Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan	88
4.1	Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra dan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	101
4.2.a	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Sebelum Perubahan)	103
4.2.b	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Setelah Perubahan)	104
5.1.a	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Sebelum Perubahan)	106
5.1.b	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Setelah Perubahan)	107
6.1.a	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020	113
6.1.b	Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2022-2024	127
7.1.a	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2020	139
7.1.b	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2021-2024	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1.	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
1.2	Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah	3
2.1	Bagan Struktur Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	12
2.2	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau	50
2.3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau.....	51
2.4	APK SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019/2020	53
2.5	APM SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019/2020	54
2.6	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020	56
2.7	Kondisi Bangunan Baik SMA/SMK Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020.....	58
2.8	Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	60
2.9	Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020	61
2.10	Persentase Guru SMA dan SMK Berkualifikasi S-1/D-IV Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020	62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Fungsi Renstra adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, disebutkan bahwa setiap OPD wajib

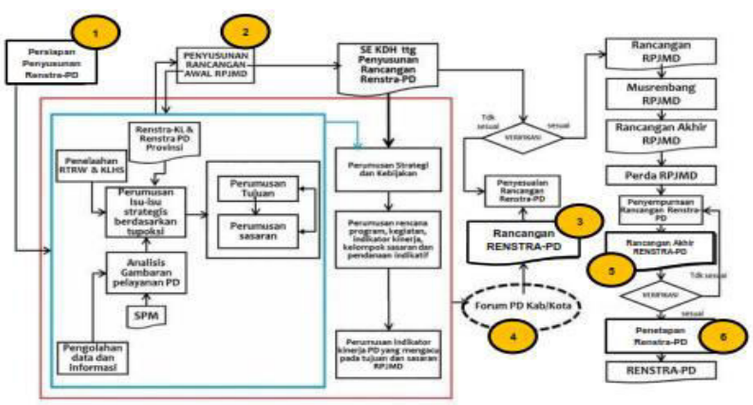
menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Disamping itu, sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) maka terdapat empat tahapan penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

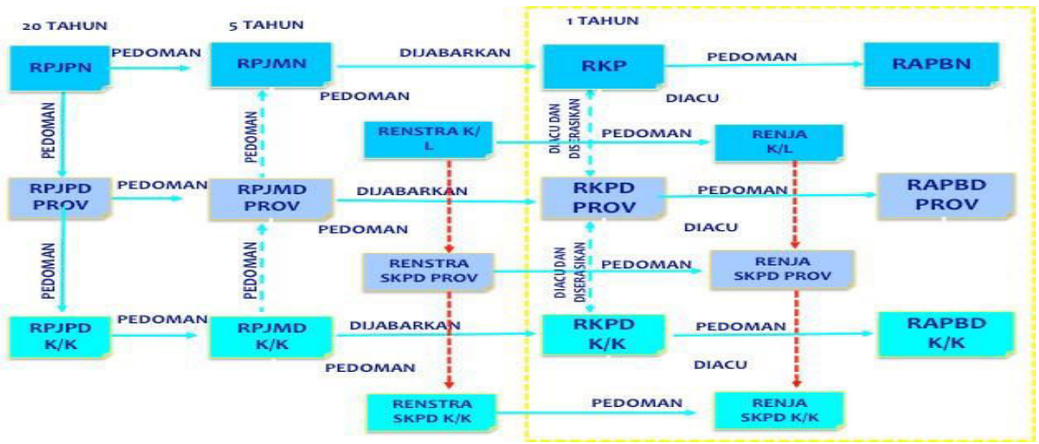
1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Terkait alur tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan bahwa posisinya sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja perangkat daerah. Dalam penyusunannya Renstra berpedoman pada RPMJD, Renstra K/L terkait, dan Renstra Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota. Untuk melihat keterkaitan dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada bagan alir berikut :



Gambar 1.2.
Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

Renstra seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Riau nantinya dijadikan acuan untuk masing-masing OPD di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Renstra Dinas Pendidikan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Dinas Pendidikan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Dinas Pendidikan. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA - OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Adapun hal-hal yang mendasari dilakukannya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah :

1. Adanya perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
2. Sinkronisasi dokumen perencanaan dengan perkembangan kondisi daerah, regional, dan nasional dengan asumsi kerangka perencanaan pembangunan daerah;
3. Sinkronisasi kebijakan nasional khususnya urusan pendidikan sesuai dengan asumsi kerangka daerah dan kerangka perencanaan pembangunan daerah;
4. Hasil evaluasi Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
5. Perbaikan/review terhadap perubahan nomenklatur maupun penyempurnaan lainnya;

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, yakni;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 67);

22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra PD adalah menentukan arah strategis Jangka Menengah PD dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis PD guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Tujuan Penyusunan Renstra PD :

1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah ;
2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah PD guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD ;
3) Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
4) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan PD;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra PD Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,

dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

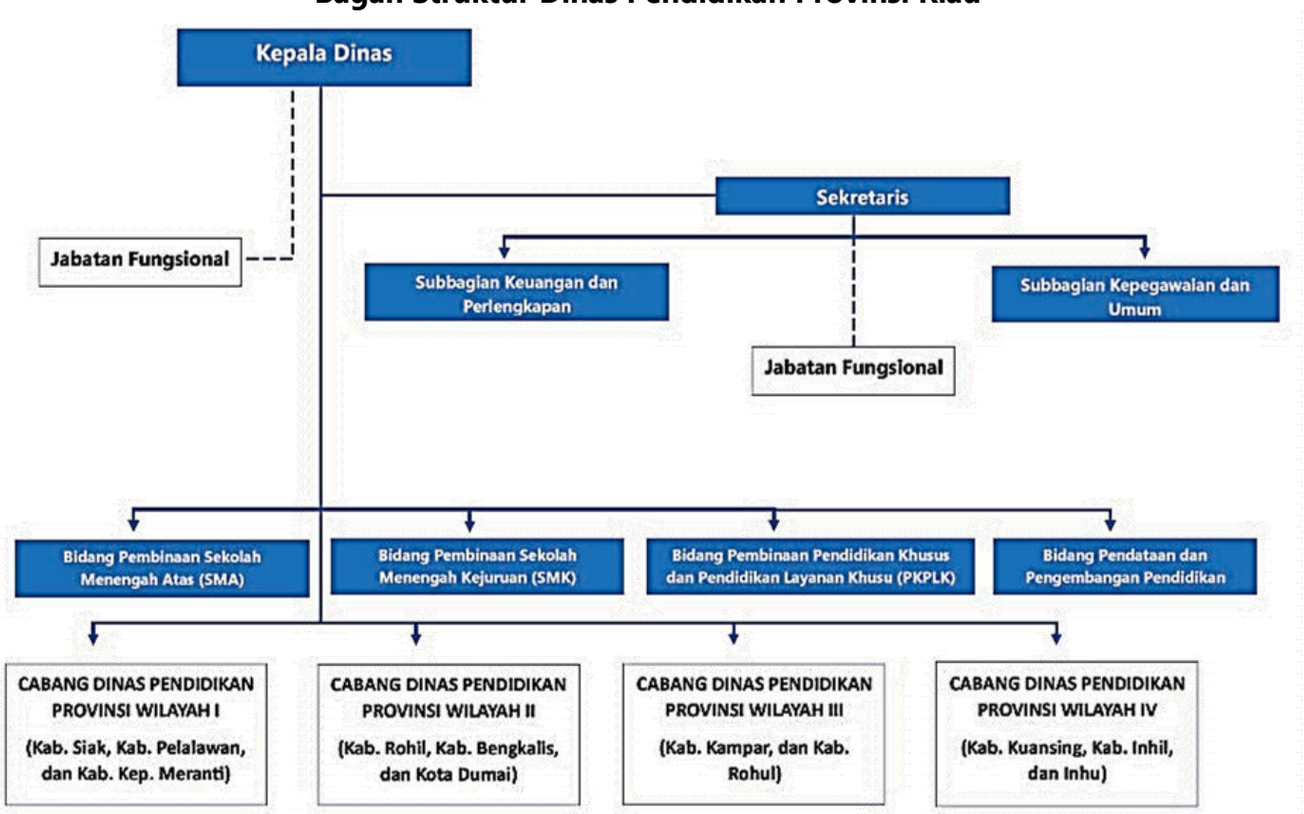
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan menyeleggarakan fungsi:

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan,
2) Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan,
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan,
4) Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, dan Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dapat dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Dinas Pendidikan Provinsi Riau



Sumber data: Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2019 dan Nomor 61 Tahun 2021

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh struktur lainnya dengan tugas sebagai berikut :

1) **Sekretariat** menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas pendidikan;
   b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
   c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
   d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan

pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

1. **Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah** yang mempunyai tugas:
   a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
   b. perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
   c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
   d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pendidikan;
   e. pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
   f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
   g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pendidikan;
   h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Pendidikan;
   i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
   j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. **Subbagian Kepegawaian dan Umum** yang mempunyai tugas:
   a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   b. perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah;
   d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
   e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
   f. penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
   g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan;
   h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;
   i. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
   j. pelaksanaan proses administrasi Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
   k. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;

l. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

3. **Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Program** pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program;
   b. pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
   d. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau; dan
   e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

2) **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)** menyelenggarakan tugas terkait penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
   b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan Sekolah Menengah Atas dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan penetapan kurikulum Sekolah Menengah Atas;
e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum serta pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas;
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas;
g. penyususan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas;
h. pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Menengah Atas Pada Kepala Sekolah Se Provinsi Riau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** menyelenggarakan tugas terkait penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:
a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaranBidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan penetapan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum serta pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;
g. penyususan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan;

h. pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan Pada Kepala Sekolah Se Provinsi Riau;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) **Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)** menyelenggarakan tugas terkait penetapan kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaranBidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
   b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
   d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan penetapan kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
   e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum serta pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
   f. pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Menengah Kejuruan Pada Kepala Sekolah Se Provinsi Riau;
   g. penyususan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
   h. pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan sekolah Khusus dan Sekolah Layanan Khusus Pada Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Se Provinsi Riau;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) **Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan** menyelenggarakan tugas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Data Pendidik, Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
   a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
   d. penyususan bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah;
   e. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Data Pendidik, Pengembangan Kebijakan Pendidikan dan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
   f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
   g. pelaksanaan penyebarluasan informasi data pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
   h. penyususan kalender pendidikan;
   i. pelaksaan Koordinas, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembinaan Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus dan Sekolah Layanan Khusus Pada Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB Se Provinsi Riau;
   j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) **Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau** terdiri dari Wilayah I dengan wilayah kerja Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Siak Sri

Indrapura, Wilayah II dengan wilayah kerja Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai berkedudukan di Duri, Wilayah III dengan wilayah kerja Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar berkedudukan di Bangkinang, dan Wilayah IV dengan wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Rengat. Untuk Kota Pekanbaru di koordinir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Cabang Dinas sebagaimana tersebut, menyelenggarakan tugas pelaksanaan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Cabang Dinas Pendidikan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yaitu untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis teknis penunjang tertentu yaitu untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam menyelenggarakan fungsi nya terdiri dari;

a. penyelenggaraan perencanaan program kerja dan rencana operasional pada Cabang Dinas Pendidikan wilayah kerjanya;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah kerjanya;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 8.222 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	JABATAN	L	P	JUMLAH	%
1	ESSELON II	1	-	1	0,01
2	ESSELON III	8	1	9	0,12
3	ESSELON IV	13	2	15	0,20
4	TENAGA GURU PNS	2.383	4.644	7.027	93,84
5	TENAGA GURU PPPK	39	69	108	1,44
6	FUNGSIONAL TERTENTU	89	41	130	1,74
7	FUNGSIONAL UMUM	150	48	198	2,64
JUMLAH		**2.683**	**4.805**	**8.222**	**100**

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2022

Dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan Dinas Pendidikan memerlukan tenaga teknis / Non PNS, adapun datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Tahun 2021

NO	JABATAN	L	P	JUMLAH	%
1	Non PNS Dinas Pendidikan Provinsi Riau	113	101	214	1,53
2	Non PNS Tenaga Pendidik	3.233	6.375	9.608	68,87
3	Non PNS Tenaga Kependidikan	2.431	1.698	4.129	29,60
JUMLAH		**5.777**	**8.174**	**13.951**	**100**

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2022

Data tabel tersebut terlihat data non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau berjumlah 13.951 dengan gender terbanyak ada pada perempuan yaitu 8.174 dan laki-laki sebanyak 5.777.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan publik sektor pendidikan selain didukung oleh personil Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diuraikan di atas, didukung juga oleh fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional (yang merupakan aset daerah), sebagaimana daftar dibawah ini :

1) Aset Tanah

Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset/Sarana Prasarana Dinas Pendidikan
Provinsi Riau Tahun 2021

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan
1	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	2.732	1982	JL. Hangtuah Kel. Suka Mulya Kec. Sail Pekanbaru	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	600	2009	Jl. Cemara Pekanbaru	-
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.174	1982	Jl. Sultan Syarif Qasim Pekanbaru	-
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	21.680	1964	Jl. Cendrawasih Dumai	SMKN Perikanan Provinsi Riau
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.550	1982	Jl. Suka Terus	Gedung Graha / Mes Wisma Handayani
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.360	1999	Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru	Dinas Pendidikan
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.021	1999	Jl. Dr. Sutomo Pekanbaru	BPG
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.740	2009	Jl. Sukaterus No. 3 Pekanbaru	BTP dan BPKB
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.305	1995	Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru	Gedung Guru
10	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	-	1963	JL. Kubang Raya	SMAN Plus
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	14.345	1963	JL. Segar rejosari kec. Tenayan raya	SLB
12	Tanah Lapangan Tenis	2.730	1982	Jl. Suka Terus Kec. Jadirejo Sukajadi Pekanbaru	SMA Handayani
13	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	-	2007	Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru	Gedung Autis
14	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	3.385	2004	Kel. Wonorejo Pekanbaru Kec. Marpoyan Damai	Gedung Sekolah SMP
15	Tanah Lapangan Tenis	1.480	1963	JL. DR. Sutomo	Lapangan Tenis
16	Tanah Kosong Lainnya	2.370	1977	JL. DR. Sutomo	

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Tanah Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 16 lokasi dari aset tersebut yang memiliki Luar terbesar adalah Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama dengan Luas 21.680 (M^2) dan yang terkecil Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dengan Luas 600 (M^2). Sedangkan aset dengan tahun

pengadaan terlama yaitu Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) di Jln. Kubang Raya dan Jln. Segar Rejosari Kec. Tenayan Raya serta Tanah Lapangan Tenis di Jln. Dr. Sutomo Pekanbaru.

2) Aset Barang

Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
Rekapitulasi Aset Jumlah Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Operational Avanza	5
2	Mobil Operational Mini Bus	2
3	Mobil Operational Nissan / Double Cabin	7
4	Mobil Operational L 300	1
5	AC	558
6	Alat Labor	238
7	Alat Labor SMA	3957
8	Amplifire	51
9	Alat Peraga SLB	75
10	Alat Peraga SMK	654
11	CCTV	64
12	Fotocopy	21
13	Freezer	5
14	Genset	41
15	External Hardisk	45
16	Dispenser	106
17	DVR CCTV	12
18	Finger Print	77
19	Infokus / Proyektor	926
20	Kamera	97
21	Kipas Angin	450
22	Komputer Server	308
23	PC	2094
24	UPS	740
25	Stabilizer	569
26	Printer	1712
27	HUB	64
28	Kulkas	30
29	Laptop	932
30	Note Book	814
31	Scanner	52
32	Router	195
33	Modem	15

34	Monitor	155
35	Handycam	15
36	GPS	7
37	Mesin Potong Kertas	30
38	Mesin Potong Rumput	79
39	Switch Jaringan	209
40	Vacum Cleaner	43
41	Vacum Packing Machine	7
42	Radio HT	43
43	Mesin Bordir	275
44	Mesin Jahit	307
45	Mesin Obras	176
46	Mesin Fax	6
47	Mesin Bor	33
48	Mesin Kompresor	42
49	Pompa Air	125
50	Mixer Sound	24
51	Racun Api	115
52	Pena Pintar	24
53	Meat Grinder	8
54	Meat Slicer	7
55	Meja Guru	417
56	Meja Siswa	2658
57	Kursi Guru	445
58	Kursi Siswa	2433
59	Kursi Staf	278
60	Meja Staf	156
61	Kursi Kepala Sekolah	26
62	Kursi Wakil Kepala Sekolah	1
63	Meja Kepala Sekolah	18
64	Meja Wakil Kepala Sekolah	8
65	Filling Kabinet	216
66	Brangkas	18
67	Sofa	75
68	Lemari	489
69	Lemari Arsip	297
70	Rak Buku	108
71	Sensor Cahaya	7
72	Sensor for Green House	6
73	Sensor Kelembapan	6
74	Sensor Konduktivitas	6
75	Sensor Pendeteksi Gas	9
76	Sensor PH	9
77	Sensor Temperatur	10
78	Sensor Ultra Violet	6
79	Sensor Warna	3

80	Soil Hardness Meter	18
81	Soil Nutrient Analyzer	18
82	Soil Tensiometer	18
83	Soil Water Potential Locator	17
84	Fortigate	1
85	Greenhouse With Fogging and	6
86	Drone	2
87	Plant Nutrition Analyzer	20
88	Portable Leaf Area Meter	4

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut diketahui bahwa Aset Barang Dinas Pendidikan Provinsi Riau ada 88 jenis barang dari aset tersebut terbanyak adalah Alat Labor SMA yang berjumlah 3.957 buah.

3) Aset Satuan Pendidikan

Rekapitulasi Asset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Asset Jumlah Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA			SMK			SLB		
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML
1	Kab. Bengkalis	34	14	48	15	11	26	2	5	7
2	Kab. Indragiri Hilir	38	26	64	8	11	19	1	1	2
3	Kab. Indragiri Hulu	29	6	35	12	5	17	1	0	1
4	Kab. Kampar	42	11	53	13	20	33	4	0	4
5	Kab. Kepulauan Meranti	17	7	24	2	6	8	1	3	4
6	Kuantan Singingi	21	0	21	12	1	13	1	0	1
7	Kab. Pelalawan	20	7	27	8	10	18	2	0	2
8	Kab. Rokan hilir	38	26	64	6	21	27	1	1	2
9	Kab. Rokan Hulu	29	6	35	23	16	39	1	2	3
10	Kab. Siak	32	4	36	12	14	26	1	2	3
11	Kota Dumai	7	8	15	7	10	17	1	2	3
12	Kota Pekanbaru	18	45	63	10	54	64	1	14	15
JUMLAH		303	156	459	128	179	307	17	17	30

Sumber : Dapodikdasmen Tahun 2021/2022 (dapo.kemdikbud.go.id)

Data tabel tersebut terlihat jumlah Sekolah SMA Terbanyak ada di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir sejumlah 64 Sekolah diikuti Kota Pekanbaru sejumlah 63 Sekolah. Jumlah SMK terbanyak ada di

Kota Pekanbaru sejumlah 64 Sekolah di ikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu 39 Sekolah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan dan Realisasi Pendanaan

Secara umum rasio capaian Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan telah mencapai 100%, hanya terdapat 2 indikator yang belum mencapai 100% diantaranya Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 dengan rasio mencapai 96,65 % dimana secara realisasi capaian 13,18 tahun yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk pada jenjang Pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah hingga Diploma II. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau harus terus berupaya agar merumuskan kebijakan agar masyarakat dapat menamatkan Pendidikan minimal D4/S1. Selanjutnya anak putus sekolah pada tahun 2021 dengan rasio mencapai 93,07 % dimana secara realisasi mencapai 0,92 % naik dari tahun 2020 sebesar 0,18 % hal tersebut dapat terjadi akibat pandemic Covid 19 dimana kondisi ekonomi orang tua menurun sehingga anak tidak dapat meneruskan proses belajar lagi. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada pelaksanaan Renstra disajikan berdasarkan Tabel T-C.23 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel 2.7.a yang menyajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015 - 2019 dan tabel 2.7.b yang menyajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel. 2.7.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah		8.89 Tahun		8,49	8,59	8,61	8,79	8.89	8,49	8,59	8,69	8,92	9,03	100,00%	100,00%	100,93%	101.48	101.57
2	Meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah		13.22 Tahun		12,74	12,86	12,98	13,1	13.22	12,74	12,86	13,43	13,11	13,14	100,00%	100,00%	103,47%	100.08	99.39
3	APK Sekolah Menengah Sederajat		82,58%		91,85%	92,37%	78,30%	80,47%	84.96	71,69%	74,92%	81,39%	82,58%	86.65	78,05%	81,11%	103,95%	102,62%	101.99%
4	APM Sekolah Menengah Sederajat		63,24%		68,86%	69,38%	62,92%	63,08%	61.59	54,59%	56,71%	60,22%	63,24%	66.86	79,28%	81,74%	95,71%	100,25%	108.56
5	Persentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S1/D IV		95,00%		93,58%	94,05%	94,52%	95,00%	NA	92,29%	94,06%	95,29%	95,33%	96,00	98,62%	100,01%	100,81%	100,35%	NA
6	Persentase SMA Terakreditasi Minimal B		95,00%		93,43%	54,60%	64,74%	74,88%	NA	85,85%	26,60%	69,36%	81,49%	86,70	91,89%	48,72%	107,14%	108,83%	NA
7	Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi Minimal B		45,40%		93,43%	54,60%	64,74%	74,88%	NA	51,35%	34%	99,87%	54,19%	82,10	54,96%	62,27%	154,26%	72,37%	NA

Tabel. 2.7.b

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun Ke-	Rasio capaian pada Tahun ke-
					2020	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				8,97	9,14	101,89
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				13,57	13,20	97,27
3	APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C (%)				85,26	84,61	100,76
4	APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C (%)				62,09	64,01	103,09
5	Angka Putus Sekolah				1,01	0,76	132,89
6	Persentase Guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi DIV/S1				95,44	96,00	100,59
7	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi Minimal B				82,63	86,50	104,68
8	Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi Minimal B				54,83	81,19	148,08

Pada tabel 2.8.a. terlihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai 100%, namun demikian secara fisik ataupun output yang dihasilkan telah mencapai 100%. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau disajikan berdasarkan Tabel T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel 2.8.a yang menyajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015 dan tabel 2.8.b yang menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 2.8.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015-2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	68.797.530.512	62.371.055.186	1.185.136.496.588	1.185.136.496.588	1.040.344.377.326	48.742.987.061	56.691.821.407	943.821.670.605	943.821.670.605	1.049.597.349.162	0,7	0,9	0,8	0,8	1,01		
Belanja Langsung	425.597.666.190	555.003.354.183	842.493.565.992	920.569.586.827	475.455.366.571	252.079.790.041	435.254.613.865	751.158.897.453	758.120.438.543	795.396.461.333	0,6	0,8	0,9	0,8	1,67		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.538.432.200	19.029.907.403	8.966.736.580	10.662.043.900	9.110.895.000	7.564.451.128	1.407.457.134	7.093.081.976	7.869.134.617	7.936.448.164	0,7	0,1	0,8	0,7	0,87	-0,76	0,67
Program Pendidikan Anak usia Dini	17.670.655.200	18.264.866.292	-	-		10.143.343.800	16.398.779.110	-	-		0,6	0,9				-1,00	
Program Pendidikan Tinggi	93.786.374.550	84.901.603.472	-	-		44.655.208.680	70.448.484.118	-	-		0,5	0,8				-1,00	
Program Pendidikan Dasar	50.334.799.340	40.894.803.118	-	-		30.422.908.661	33.102.059.700	-	-		0,6	0,8				-1,00	
Progran Pendidikan Non Formal dan Informal	52.492.728.850	59.833.224.624				36.365.552.020	48.664.096.753	-	-		0,7	0,8				-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.517.000.000	15.809.172.446	1.051.550.000	2.008.538.100	1.012.000.000	354.710.023	9.575.170.935	916.953.179	1.006.799.850	804.731.948	0,1	0,6	0,9	0,5	0,8	-0,56	-0,70
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1.875.000.000	2.222.495.000	892.576.000	496.702.400	463.678.400	1.040.860.650	1.057.493.707	696.143.200	389.112.200	242.720.800	0,6	0,5	0,8	0,8	0,52	-0,74	-0,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	720.000.000	350.596.000				457.288.425	332.864.500				0,6					-1,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	492.670.000	500.000.000	442.250.000	-		346.378.650	420.605.000	373.537.700			0,7		0,8			-1,00	-1,00
Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun																	-1,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan																	-1,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan																	
Program Peningkatan Mutu Kurikulum																	-1,00
Program Pemerataan dan Perluasan Akses, Mutu, Relevansi dan daya saing																	-1,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi																	-1,00
Program Penataan Kelembagaan		210.550.000															
Program Penataan Tatalaksana		173.000.000															
Program Pembangunan Sekolah Terpadu	54.000.000.000					-										-1,00	
Program Pendidikan Menengah	113.061.876.700	166.546.444.333	547.041.238.533	549.213.600.567	456.361.160.545	84.752.026.741	136.804.186.236	490.653.684.504	400.376.135.996	400.381.745.668	0,7	0,8	0,9	0,7	0,88	3,86	4,78
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	23.301.394.150	26.298.213.585	211.110.748.207	71.663.802.630	80.253.025.300	5.867.739.011	20.573.616.063	188.740.654.992	48.190.093.505	58.984.453.845		0,8	0,9	0,7	0,73	2,08	
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	34.815.955.200	70.165.428.000	72.838.466.672	43.890.299.230	84,055,679,800,00	19.497.163.577	59.829.492.631	62.541.591.902	37.519.038.717	44.682.864.464		0,9	0,9	0,9	0,53	0,26	
Program Pendidikan Luar Biasa																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan dan Pelestarian Budaya	21.590.780.000	49.679.849.910				10.487.388.675	36.519.880.978				0,5	0,7				-1,00	-1,00
Program Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya																	
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)				242.634.600.000	288.279.379.126				262.770.123.658	282.363.496.444				1,1	0,98		
Program Pengembangan Data/Informasi		123.200.000	150.000.000	-			120.427.000	143.250.000	-				1				

Tabel. 2.8.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung					
	Belanja Gaji Dan Tunjangan	1.047.187.775.345,30	982.011.856.456,00	93,78	100,00	100,00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan					
	Diklat Muatan Lokal Bagi Guru Sma/smk Se Provinsi Riau	-	-	-	-	-
	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berprestasi Seprovinsi Riau"	615.035.000,00	162.000.000,00	26,34	100,00	100,00
	Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif Menjadi Guru Produktif	-	-	-	-	-
	Mgmp Guru Mata Pelajaran Program Pendidikan Menengah	568.928.500,00	521.364.100,00	91,64	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi Riau	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (fls2n) Tingkat Sd, Smp, Sma Dan Smk	-	-	-	-	-
	Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pengawas Sma, Smk Dan Slb	80.680.000,00	67.547.500,00	83,72	100,00	100,00
	Peningkatan Kompetensi Pendidik Pns Dan Gtt Sma, Smk Dan Slb	1.520.990.900,00	1.178.257.200,00	77,47	100,00	100,00
	Penyenggaraan Olimpiade Sains Nasional (osn) Tingkat Sd, Smp Dan Sma	895.986.418,00	351.811.550,00	39,27	68,26	68,26
	Pengelolaan Data Pendidikan	141.719.000,00	36.000.000,00	25,40	42,10	42,10
	Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (ppg) Dalam Jabatan Sma, Smk Dan Slb	1.092.227.700,00	403.281.700,00	36,92	100,00	100,00
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Sma, Smk Dan Slb	2.443.772.200,00	2.323.630.700,00	95,08	100,00	100,00
	Olimpiade Guru Nasional (ogn) Provinsi Riau	-	-	-	-	-
	Diklat Calon Pengawas Dan Penguatan Pengawas Satuan Pendidikan Menengah	690.364.700,00	152.696.000,00	22,12	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Pemberian Beasiswa Bidik Misi	26.005.163.900,00	24.162.112.300,00	92,91	100,00	100,00
	Pemberian Beasiswa Pada Perguruan Tinggi Dalam Dan Luar Provinsi Riau	56.884.978.000,00	38.335.732.064,00	67,39	100,00	100,00
	Peningkatan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi Dan Kabupaten/ Kota	623.774.500,00	493.266.760,00	79,08	100,00	100,00
	Diklat Calon Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK Dan SLB	890.462.000,00	682.583.700,00	76,66	100,00	100,00
	Ppdb On Line SMA/SMK	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	148.055.900,00	136.941.416,00	92,49	100,00	100,00
	Festival Literasi Siswa (FLS) SD, SMP, SMA Dan SMK	-	-	-	-	-
	Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik	3.694.642.850,00	3.334.875.500,00	90,26	100,00	100,00
2	Belanja Langsung	1.171.019.833.243,86	1.079.744.629.498,00	92,21	92,88	99,57
	Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus					
	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB Dan	65.364.218,00	53.827.418,00	82,35	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	SMALB					
	Pendampingan Kegiatan Adem Dan Adik Bagi Daerah 3T Dan KAT	191.160.400,00	178.293.600,00	93,27	100,00	100,00
	Apresiasi GTK Paud Dan Gebyar Paud Dikmas	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah I	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran Pkplk Wilayah II	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah III	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah IV	-	-	-	-	-
	Penelusuran Minat Bakat Dan Kreatifitas PKPLK	181.683.130,00	15.666.430,00	8,62	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	2.813.154.000,00	2.142.811.500,00	76,17	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLBN Pembina	325.864.850,00	111.774.850,00	34,30	71,53	71,53

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Wilayah Pekanbaru					
	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah I	178.977.700,00	95.587.700,00	53,41	77,02	77,02
	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah II	424.351.100,00	208.261.100,00	49,08	75,94	75,94
	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah III	642.926.800,00	260.127.800,00	40,46	72,69	72,69
	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah IV	390.160.500,00	198.635.500,00	50,91	77,39	77,39
	Peningkatan Kesejahteraan Guru Marginal	4.836.372.200,00	4.734.082.200,00	97,88	100,00	100,00
	Rehabilitasi PKPLK Wilayah III	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi PKPLK Wilayah IV	-	-	-	-	-
	Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	5.400.236.800,00	3.464.637.088,00	64,16	86,52	86,52
	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah I	-	-	-	-	-
	Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeuler	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	PKPLK Wilayah II					
	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah IV	-	-	-	-	-
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah II	-	-	-	-	-
	Persiapan Dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	1.700.418.250,00	1.322.253.572,00	77,76	89,15	89,15
	Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1.835.209.100,00	1.745.078.436,00	95,09	100,00	100,00
	Rehabilitasi PKPLK Wilayah II	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi PKPLK Wilayah Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah I	-	-	-	-	-
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pkplk Wilayah III	-	-	-	-	-
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Wilayah IV					
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
	RKB Pkplk Wilayah I	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi PKPLK Wilayah I	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	282.000.000,00	274.675.000,00	97,40	100,00	100,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	157.500.000,00	151.364.400,00	96,10	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	200.000.000,00	78.575.000,00	39,29	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	250.000.000,00	185.100.000,00	74,04	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	400.000.000,00	176.680.860,00	44,17	100,00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung	236.000.000,00	234.855.000,00	99,51	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Kantor					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional I	500.000.000,00	294.081.750,00	58,82	78,07	78,07
	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional II	500.000.000,00	164.060.680,00	32,81	45,62	45,62
	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional III	500.000.000,00	227.831.620,00	45,57	57,41	57,41
	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional IV	500.000.000,00	401.436.048,00	80,29	84,01	84,01
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	439.092.869,00	439.092.687,00	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	472.577.684,00	339.035.140,00	71,74	100,00	100,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	267.560.000,00	152.000.000,00	56,81	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.900.565.000,00	1.601.498.222,00	84,26	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	771.825.000,00	710.652.400,00	92,07	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	837.813.000,00	514.960.000,00	61,46	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	300.000.000,00	115.099.310,00	38,37	100,00	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	80.000.000,00	79.825.500,00	99,78	100,00	100,00
	Penyediaaan Makan Dan Minuman	562.500.000,00	197.605.000,00	35,13	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	4.004.040.000,00	3.818.800.000,00	95,37	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	360.000.000,00	360.000.000,00	100,00	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000,00	2.287.000,00	4,57	100,00	100,00
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.247.620.000,00	1.119.117.600,00	89,70	100,00	100,00
	Program Bantuan Operasional Sekolah					
	Penyelnggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	336.111.642.497,00	334.022.037.306,00	99,38	100,00	100,00
	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	405.501.723.400,00	402.696.420.316,00	99,31	99,95	99,95

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan Bos Afirmasi (DAK)	9.944.000.000,00	1.140.000.000,00	11,46	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Bos Kinerja (DAK)	36.021.530.000,00	4.680.000.000,00	12,99	100,00	100,00
	Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah					
	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan Dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	12.348.400,00	12.348.400,00	100,00	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMA Wilayah I	27.537.708,00	19.020.208,00	69,07	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMA Wilayah II	31.369.400,00	29.046.900,00	92,60	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMA Wilayah III	12.721.600,00	11.751.600,00	92,38	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMA Wilayah IV	21.362.108,00	18.199.608,00	85,20	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMA Kota Pekanbaru	2.084.800,00	2.084.800,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan USB SMA Wilayah III	118.772.500,00	95.596.800,00	80,49	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah I	13.408.600,00	10.603.600,00	79,08	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sma Wilayah II	18.749.900,00	15.879.900,00	84,69	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah III	10.195.800,00	7.320.800,00	71,80	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah IV	133.837.250,00	108.753.600,00	81,26	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah I	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah II	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah III	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah IV	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Labor IPA SMA	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah I	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah II	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah III	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah IV	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah II	200.000.000,00	7.249.000,00	3,62	15,00	15,00
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah II	-	-	-	15,00	15,00
	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	3.518.963.427,86	1.722.160.200,00	48,94	85,79	85,79
	Penyelenggaraan SMA Pintar	2.837.285.834,00	1.785.848.100,00	62,94	89,84	89,84
	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	101.108.859.000,00	98.773.592.385,00	97,69	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	337.275.400,00	-	-	15,00	15,00
	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	119.229.000,00	103.818.000,00	87,07	100,00	100,00
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah II	16.829.850,00	16.829.850,00	100,00	100,00	100,00
	Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	20.966.400,00	20.028.990,00	95,53	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	6.329.211.100,00	2.976.073.595,00	47,02	87,14	87,14
	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah I	514.600.000,00	508.632.986,00	98,84	100,00	100,00
	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah II	1.039.040.000,00	986.984.280,00	94,99	100,00	100,00
	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah II	-	-	-	-	-
	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	129.209.527.000,00	126.401.623.250,00	97,83	100,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah I	1.071.000.000,00	843.997.820,00	78,80	100,00	100,00
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah II	1.178.600.000,00	947.502.705,00	80,39	100,00	100,00
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah III	850.000.000,00	633.199.365,00	74,49	100,00	100,00
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah IV	850.000.000,00	649.684.365,00	76,43	100,00	100,00
	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Kota Pekanbaru	639.900.000,00	488.104.895,00	76,28	100,00	100,00
	Pengadaan Sarana Prasarana, alat Labor Dan Alat Praktek Wilayan I	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana Prasarana, alat Labor Dan Alat Praktek Wilayan II	-	-	-	-	-
	Sertifikasi Ant IV Dan Att IV Siswa Nautika Dan Teknika	12.565.100,00	12.565.100,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah I	2.265.000,00	2.265.000,00	100,00	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMK Wilayah I	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	3.039.905.500,00	1.631.749.509,00	53,68	83,21	87,87
	Rehabilitasi SMK Wilayah	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	II					
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah I	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah II	9.382.500,00	9.382.500,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Smk Wilayah III	5.615.000,00	5.615.000,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah IV	11.230.000,00	11.230.000,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah III	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah IV	3.510.000,00	3.510.000,00	100,00	100,00	100,00
	Pembangunan Dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Kota Pekanbaru	450,00000	450,00000	100,00	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMK Wilayah III	1.845.000,00	1.845.000,00	100,00	100,00	100,00
	Rehabilitasi SMK Wilayah IV	-	-	-	-	-

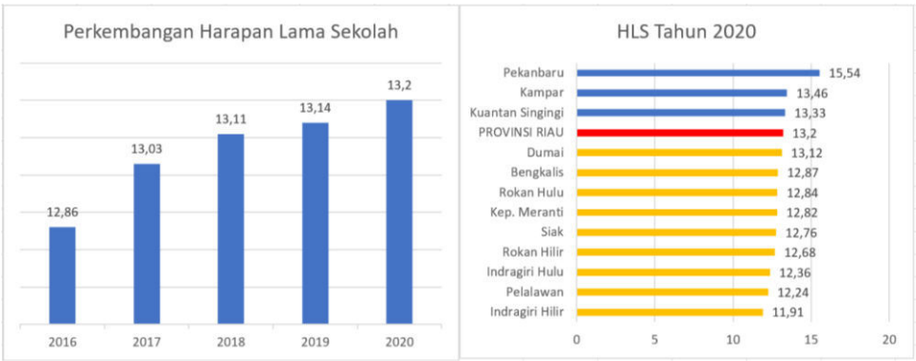
No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Capaian pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
	Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu	-	-	-	-	-
	TOTAL PER TAHUN	**2.218.207.608.586,16**	**2.061.945.373.090,00**	**92,96**	**92.95**	**99,77**

2.3.2. Kinerja Pendidikan Terhadap Indikator RPJMD

1) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka harapan lama sekolah tahun 2016 – 2020 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2020 yaitu 13,20 tahun sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Hal ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan hingga Diploma II namun tidak tamat.

Gambar 2.2
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Riau



sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

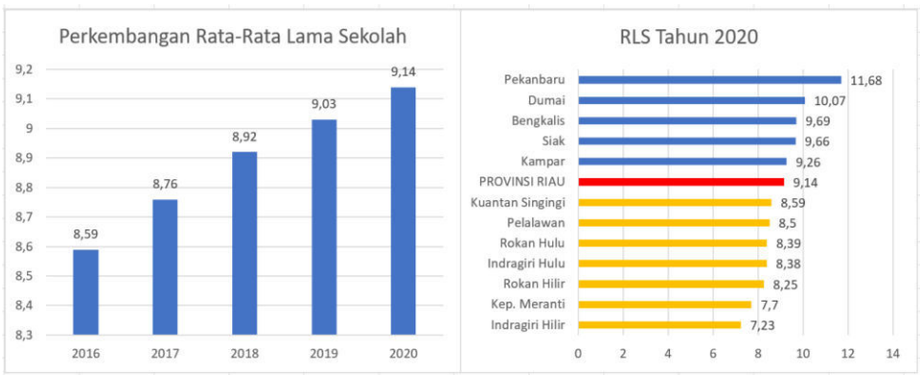
Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga wilayah yang memiliki HLS lebih tinggi dari rata-rata HLS Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar masing-masing 15,54 tahun, 13,33 tahun dan 13,46 tahun. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk yang berumur 19-24 tahun yang melanjutkan ke perguruan tinggi dimana Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi dan Kampar menjadi urutan tertinggi dari jumlah penduduknya yang masuk perguruan tinggi.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 – 2020 Provinsi Riau memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,56 % per tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Riau yang lebih baik. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga

tahun 2020 yaitu 9,14 tahun masih dibawah wajib belajar 9 tahun. Hal ini berarti bahwa penduduk Riau yang berusia 25 tahun ke atas telah menduduki jenjang Pendidikan hingga kelas X (SMA kelas 1) namun tidak tamat.

Gambar 2.3
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau



sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Namun demikian, pencapaian angka rata-rata lama sekolah Provinsi Riau lebih baik dibandingkan Nasional 8,48 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 15 tahun dan didukung pendidikan universal. Terdapat 7 kabupaten yang perlu mendapatkan perioritas utama dalam peningkatan RLS karena berada di bawah rata-rata RLS Provinsi yaitu Kuantan Singingi sampai dengan Indragiri Hilir.

3) Angka Pastisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tujuan pengukuran APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan APK tingkat pendidikan SMA/SMK/MA Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

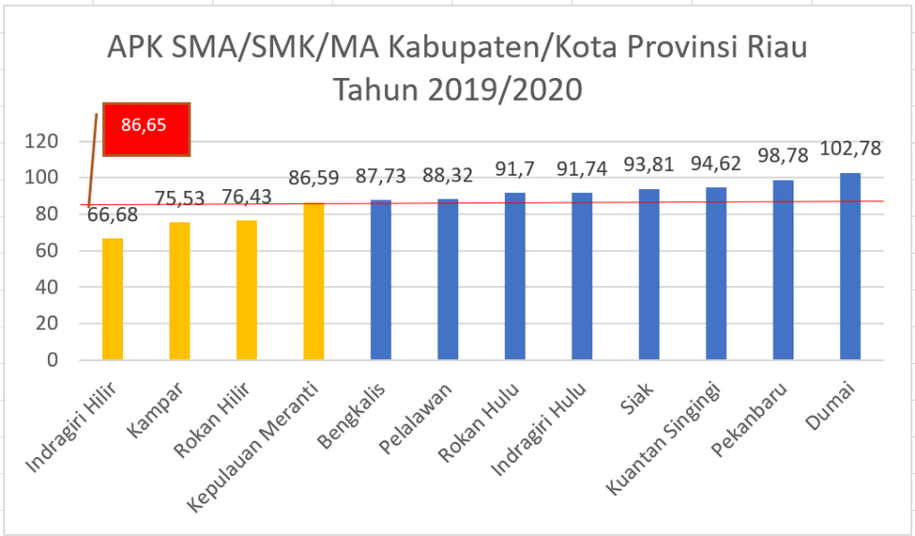
Tabel 2.9
APK SMA/SMK/MA Provinsi Riau

NO	Kabupaten/Kota	APK (Tahun)					Pertumbuhan /Tahun%
		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	
1	Kuantan Singingi	88,17	90,69	91,50	86,21	94,62	1,93
2	Indragiri Hulu	76,68	82,75	84,88	79,67	91,74	4,88
3	Indragiri Hilir	59,50	62,63	61,81	47,15	66,68	5,41
4	Pelalawan	76,13	80,80	84,07	85,91	88,32	3,79
5	Siak	85,59	89,44	89,66	87,40	93,81	2,39
6	Kampar	68,68	71,61	73,08	62,12	75,53	3,23
7	Rokan Hulu	80,93	85,75	88,52	86,64	91,70	3,23
8	Bengkalis	78,61	82,48	84,19	79,43	87,73	2,95
9	Rokan Hilir	71,00	74,03	73,60	68,80	76,43	2,06
10	Kep. Meranti	82,43	85,02	83,84	69,23	86,59	2,35
11	Pekanbaru	92,85	95,15	97,52	94,13	98,78	1,61
12	Dumai	89,55	92,61	93,43	93,82	102,78	3,57
RIAU		**77,97**	**81,39**	**82,54**	**76,65**	**86,65**	**2,93**

sumber data : Pusdatin Kemendikbud, Tahun 2021

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan APK SMA/MA/SMK Provinsi Riau rata-rata sebesar 2,93 persen, dari 77,97 persen meningkat menjadi 86,65 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK selama kurun waktu tersebut. Namun nilai ini masih berada di bawah apabila dibandingkan APK nasional dengan capaian tahun 2019/2020 sebesar 92,92. Bila dilihat sebarannya pada masing-masing kabupaten/kota dalam Provinsi Riau terdapat 4 Kabupaten (Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) yang APK SMA/MA dan SMK di bawah capaian Provinsi Riau sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4
APK SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2019/2020



sumber data : Pusdatin Kemendikbud, Tahun 2021

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Perkembangan APM SMA/SMK/MA Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
APM SMA/SMK/MA Provinsi Riau

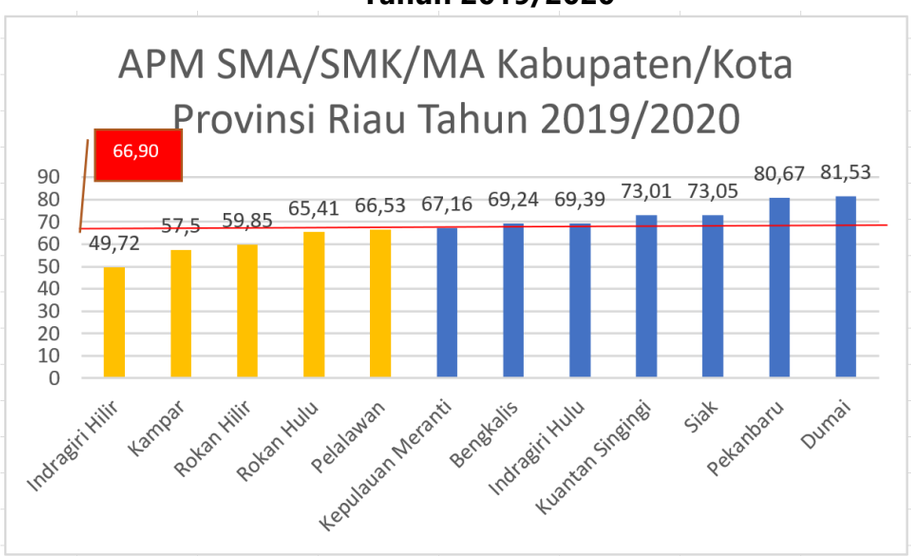
NO	Kabupaten/Kota	APM (Tahun)					Pertumbuhan /Tahun%
		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	
1	Kuantan Singingi	67,14	68,56	72,49	63,44	73,01	2,61
2	Indragiri Hulu	57,76	59,27	64,42	55,73	69,39	5,58
3	Indragiri Hilir	44,45	45,28	47,54	33,9	49,72	6,21
4	Pelalawan	56,64	58,92	65,67	63,51	66,53	4,24
5	Siak	65,15	67,84	71,82	65,67	73,05	3,17
6	Kampar	52,94	54,69	58,27	47,43	57,5	3,13
7	Rokan Hulu	61,96	63,92	70,10	64,02	65,41	1,58
8	Bengkalis	57,60	59,24	62,58	56,59	69,24	5,32
9	Rokan Hilir	52,34	52,98	54,32	48,78	59,85	4,06
10	Kep. Meranti	60,11	59,08	60,07	48,33	67,16	4,84
11	Pekanbaru	70,50	72,76	76,51	71,57	80,67	3,65
12	Dumai	66,07	68,07	71,56	68,83	81,53	5,70
RIAU		**58,63**	**60,20**	**63,8**	**56,36**	**66,90**	**3,91**

sumber data : Pusdatin Kemendikbud, Tahun 2021

APM SMA/SMK/MA Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 capaian APM sebesar 58,63 persen meningkat menjadi 66,9 persen pada tahun 2020 atau meningkat rata-rata 3,91 persen. Peningkatan APM ini juga mengindikasikan bahwa meningkatkan kualitas pendidikan SMA/SMK/MA di Provinsi Riau yang kedepannya akan menciptakan generasi handal dan berdaya saing serta mampu berkompetensi dengan SDM dari daerah lain, baik secara regional, nasional maupun internasional.

Jika dilihat sebaran APM SMA/SMK/MA pada masing-masing kabupaten/kota terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian APM 2020 dibawah rata-rata provinsi antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Keadaan ini patut menjadi perhatian serius mengingat kewenangan pendidikan sekolah menengah sudah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5
APM SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2019/2020



sumber data : Pusdatin Kemendikbud, Tahun 2021

Persentase anak tidak sekolah di Provinsi Riau tertinggi sebesar 23,75% pada tahun 2019 dan 22,31% pada tahun 2020, yang masih tergolong cukup tinggi. Apabila dibandingkan capaian tahun 2020 telah

mengalami penurunan sebesar 1,44% dibanding tahun 2019. Secara rinci data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Persentase Anak Tidak Sekolah Jenjang SMA/Sederajat Provinsi Riau Tahun 2019-2020

NO	Jenis Kelamin	2019	2020
1	Laki-Kali	25,17	23,57
2	Perempuan	22,24	21,00
3	Laki-Laki + Perempuan	23,75	22,31

sumber data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun 2018-2020. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional. Secara rinci angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Angka Pastisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2018-2020

NO	APS	2018	2019	2020
1	Provinsi Riau	27,19	28,16	28,35
2	Indonesia	24,40	25,21	25,56

sumber data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021

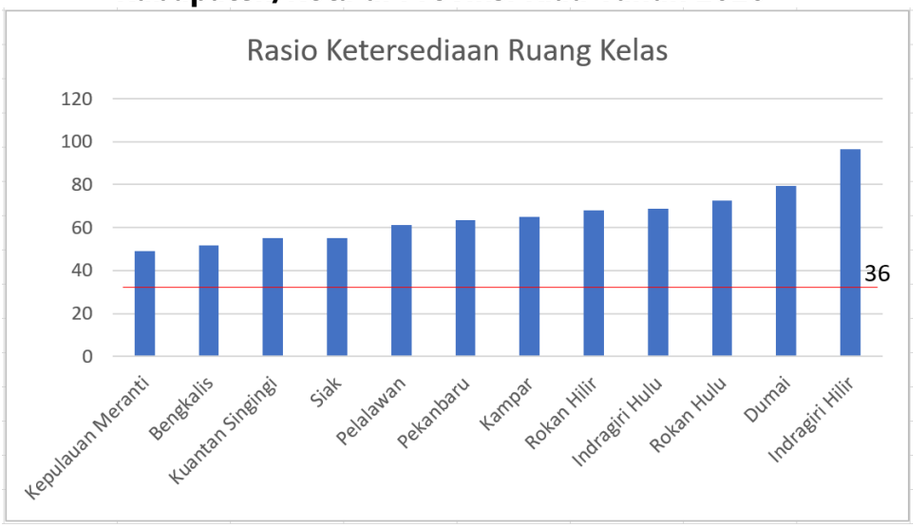
5) Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan sekolah ditunjukkan dengan banyaknya ruang kelas yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dengan rasio sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

Pada tingkat SMA, ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah SMA di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 64,83 sedangkan SPM SMA/SMK/MA yang ditetapkan berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 adalah sebesar 15 orang paling sedikit dan 36 orang paling banyak. Keadaan ini menggambarkan ketersediaan sekolah SMA di Provinsi Riau saat ini masih jauh dari SPM yang sudah ditetapkan. Dilihat dari sebarannya, semua kabupaten/ kota melebihi SPM. Jika pemerintah Provinsi Riau melakukan kebijakan wajib belajar 12 tahun

dengan asumsi penduduk usia sekolah 16-18 semuanya sekolah, maka untuk mencapai SPM diperlukan penambahan ruang kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar berikut :

Gambar 2.6
Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020



sumber data : Pusdatin Kemendikbud, Tahun 2021

6) Sekolah Kondisi Baik

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran penting untuk kelancaran proses pendidikan. Bangunan gedung sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar, karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Secara rinci jumlah ruang kelas SMA/SMK di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK di Provinsi Riau Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ruang Kelas Sekolah kondisi baik	7.196	7.490	8.346	8.317	8.972
2	Ruang Kelas Sekolah kondisi rusak sedang	287	262	290	302	537
3	Ruang Kelas Sekolah kondisi rusak berat dan total	265	346	238	258	160
Jumlah Seluruh Ruang Kelas Sekolah		7.748	8.098	8.874	8.877	9.669

sumber data : Kemendikbud, Neraca Pendidikan Tahun 2016-2020

Mencermati data pada tabel tersebut, selama tahun 2016-2020 jumlah ruang kelas SMA/SMK/MA di Provinsi Riau meningkat rata-rata 5,76 persen per tahun, begitu pula dengan ruang kelas dalam kondisi baik. Selanjutnya, jumlah bangunan ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak sedang mengalami peningkatan rata-rata 20,98 persen per tahun, sedangkan untuk kondisi rusak berat mengalami penurunan -7,56 per tahun. Selanjutnya bila dibandingkan antara jumlah seluruh ruang kelas SMA/SMK dengan jumlah ruang kelas SMA/SMK yang berada dalam kondisi baik dalam kurun tahun yang sama, maka diperoleh besaran persentase ruang kelas yang berkondisi baik yang menurun rata-rata 6,74 persen per tahun. Pada tahun 2020 persentase bangunan ruang kelas SMA/SMK yang berada dalam kondisi baik adalah 92,79 persen. Ini berarti jumlah bangunan ruang kelas sekolah SMA/SMK yang rusak adalah 7,21 persen. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah mengalokasikan anggaran sebanyak 20 persen dari APBD mandatori setiap tahun sudah lebih fokus dan jelas lokasinya dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimum.

Selanjutnya dilihat dari sebaran bangunan ruang sekolah SMA/SMK/MA yang berada dalam kondisi baik pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah. Persentase kondisi bangunan baik tingkat SMA/SMK/MA cukup baik dibandingkan dengan tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Dimana kondisi bangunan SMA/SMK/MA yang baik sebesar 61,95% dan sisanya 38,05% masih dalam kondisi buruk.

Tabel 2.14
Persentase Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

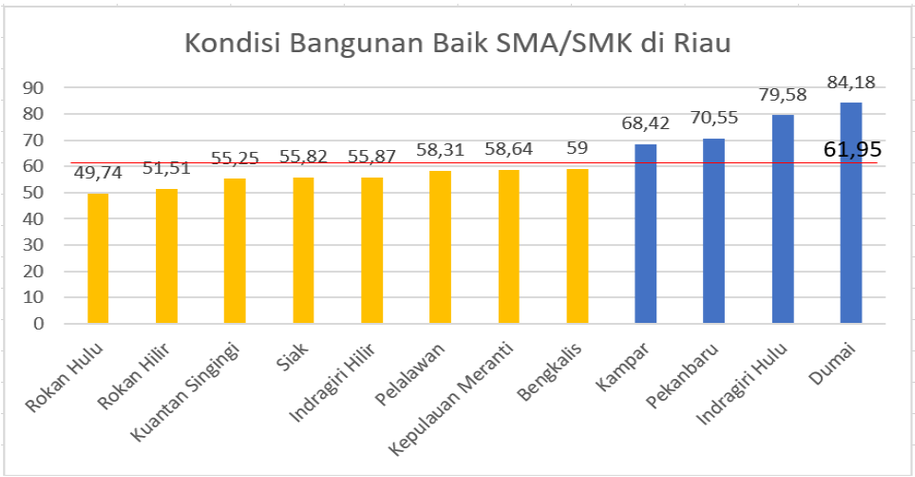
NO	Kabupaten/Kota	Kondisi Bangunan Baik	Jumlah Seluruh Sekolah	Persentase Bangunan Baik
1	Kuantan Singingi	166	299	55,25
2	Indragiri Hulu	265	333	79,58
3	Indragiri Hilir	238	426	55,87
4	Pelalawan	186	319	58,31
5	Siak	259	464	55,82
6	Kampar	494	722	68,42

7	Rokan Hulu	193	388	49,74
8	Bengkalis	423	717	59,00
9	Rokan Hilir	341	662	51,51
10	Kepulauan Meranti	129	220	58,64
11	Pekanbaru	666	944	70,55
12	Dumai	165	196	84,18
Jumlah		**3.525**	**5.690**	**61,95**

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

melihat kondisi data tersebut terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata Provinsi Riau sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.7
Kondisi Bangunan Baik SMA/SMK Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020



sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Secara kewilayahan terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki bangunan ruang sekolah baik di atas rata-rata Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, selainnya masih di bawah rata-rata provinsi. Dari kondisi tersebut di atas kebijakan rehabilitasi sekolah harus menjadi prioritas kedepannya. Berikut gambar terkait dengan kondisi bangunan SMA/SMK yang baik kabupaten kota di Provinsi Riau Tahun 2020.

7) Rasio Guru dengan Murid

Perbaikan mutu pendidikan dan perluasan akses terhadap pendidikan menengah akan memerlukan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai

tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu rasio antara guru dan murid haruslah berada dalam jumlah yang ideal. Rasio guru dengan murid pada pendidikan menengah selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun pada 3 tahun terakhir atau terjadinya perbaikan, Tahun 2020 seorang guru mengajar hanya 13 orang siswa dibandingkan 15 murid Tahun 2018. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Rasio Guru dengan Murid dan Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/MA di Provinsi Riau Tahun 2016-2020

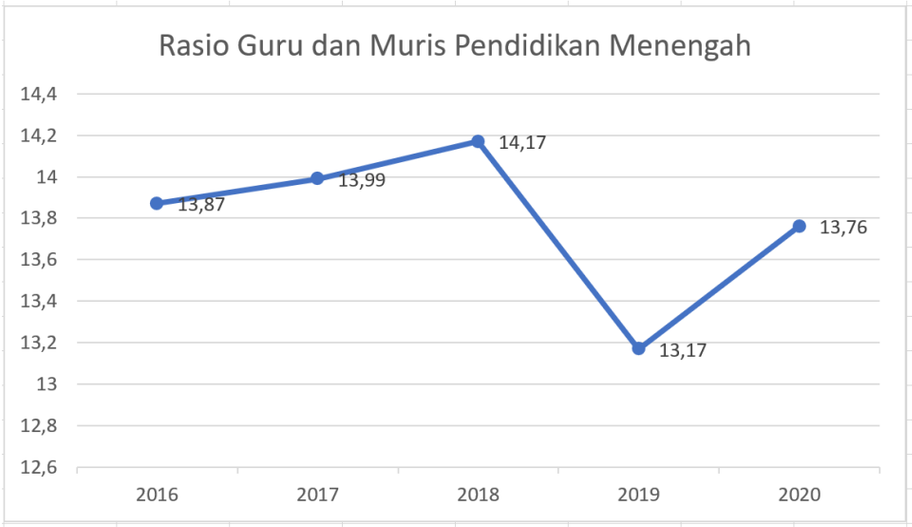
NO	Uraian	APM (Tahun)					Pertumbuhan /Tahun%
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Guru (SMA/SMK)	16.809	17.451	17.208	20.127	19.462	4,02
2	Jumlah Murid (SMA/SMK)	233.206	244.122	243.882	264.977	267.827	3,58
3	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Menengah	13,87	13,99	14,17	13,17	13,76	-0,11
4	Jumlah Siswa Putus Sekolah	2.093	2.179	1.743	2.013	2.529	6,31
5	Angka Putus Sekolah (%)	0,90	0,89	0,71	0,76	0,94	2,35

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Data pada Tabel 2.60 memperlihatkan bahwa jumlah murid sekolah menengah tingkat SMA sederajat selama kurun tahun 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata 3,58% per tahun. Sementara itu jumlah guru selama kurun tahun yang sama menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan pertumbuhan sebesar 4,02% per tahun. Rasio guru dan murid Pendidikan menengah cenderung tetap dengan sedikit fluktuasi diantara dengan nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar 14,17. Sedangkan angka putus sekolah menengah sederajat dengan kelompok umur 16-18 tahun di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 6,31 persen, dimana berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau terdapat 0,94 persen atau sebanyak 2.529 orang dari total 267.827 orang siswa putus sekolah pada tahun 2020. Angka Putus Sekolah tertinggi berada di Kabupaten Kuantan Singingi (1,49%), Kepulauan Meranti (1,44%) dan Indragiri Hilir 1,40%).

Kondisi yang demikian diikuti dengan capaian rasio antara guru dengan murid yang juga berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada masa 2016-2020 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -0,11%. Walaupun demikian rasio yang dicapai selama kurun waktu yang sama tidak ada yang melampaui standar pelayanan minimum. Rasio guru dan murid Pendidikan menengah dapat dilihat pada gamber berikut :

Gambar 2.8
Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Menengah
di Provinsi Riau Tahun 2016-2020



sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Secara kewilayahan, rasio guru dan murid pendidikan menengah berkisar antara 11,2 poin sampai dengan 14,64 poin. Dimana rasio terendah pada Kabupaten Kuantan Singingi dan yang tertinggi pada Kabupaten Rokan Hilir. Pada Kabupaten Kep. Meranti terdapat jumlah guru yang terkecil sebesar 584 orang guru dengan rasio guru dan murid juga termasuk yang terkecil yakni sebesar 11,4 poin. Rasio Guru dengan Murid Sekolah Menengah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Rasio Guru dengan Murid Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019/2020

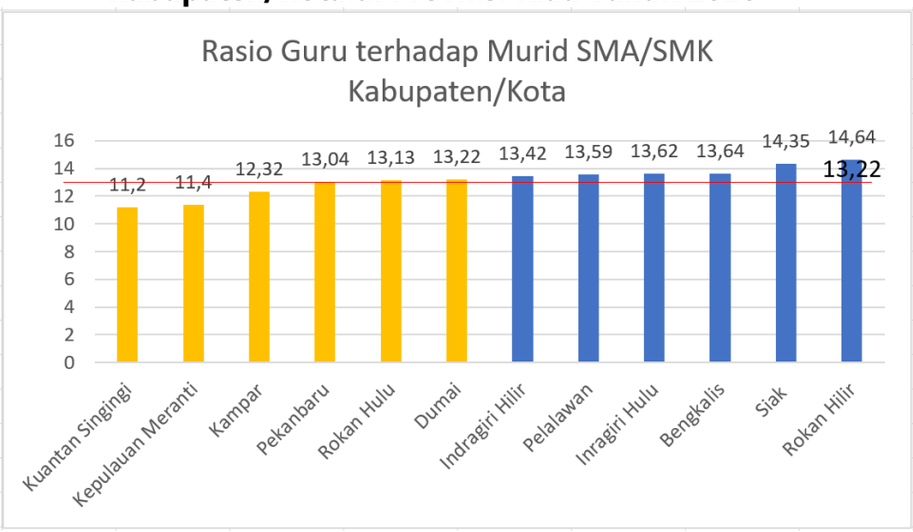
NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru dan Murid
1	Kuantan Singingi	1.198	13.422	11,20
2	Indragiri Hulu	1.252	17.052	13,62
3	Indragiri Hilir	1.406	18.875	13,42

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru dan Murid
4	Pelalawan	1.120	15.225	14,35
5	Siak	1.474	21.158	12,32
6	Kampar	2.296	28.291	13,13
7	Rokan Hulu	1.662	21.821	13,64
8	Bengkalis	2.049	27.951	13,64
9	Rokan Hilir	1.870	27.381	14,64
10	Kepulauan Meranti	584	6.657	11,40
11	Pekanbaru	4.165	54.327	13,04
12	Dumai	1.051	13.895	13,22
Jumlah		**20.127**	**266.055**	**13,22**

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut bahwa terdapat 6 kabupaten dengan rasio yang berada diatas rasio provinsi dan juga 6 kabupaten/kota yang berada di bawah rasio provinsi. Secara rinci kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.9
Rasio Guru dengan Murid Pendidikan Menengah
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020



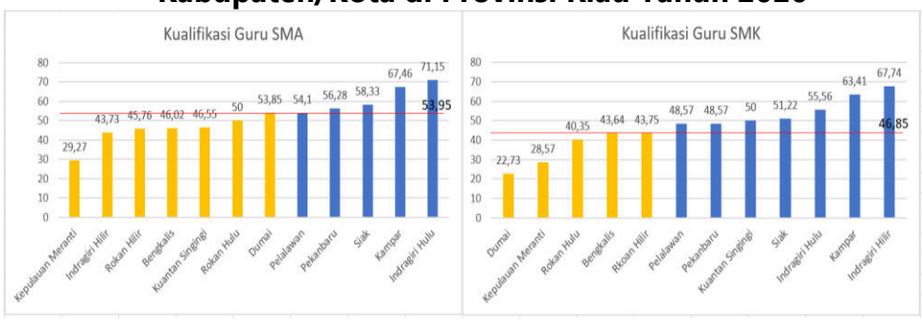
sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

8) Guru Kualifikasi S1/D-IV

Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh sebab itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, pemerintah mensyaratkan kualifikasi akademik minimal pendidikan guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 16 Tahun 2007 kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru pada berbagai jenjang pendidikan SMA dan MA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan serta diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Persentase Guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/DIV di Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.10
Persentase Guru SMA dab SMK Berkualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020



sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Pada tahun 2020 besaran persentase guru SMA yang berkualifikasi akademik S1/D-IV di Provinsi Riau adalah sebesar 53,95 persen, dan SMK sebesar 46,85 persen. Kemudian dilihat dari sebaran rata-rata pada masing-masing kabupaten/kota, terdapat empat kabupaten/kota yang melampaui rata-rata SMA dan SMK Provinsi, yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

9) Sekolah Luar Biasa

Pendidikan Luar Biasa atau Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Perkembangan sekolah luar biasa di Provinsi Riau dari tahun 2016 – 2020, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Perkembangan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Riau
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	APM (Tahun)					Pertumbuhan /Tahun%
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah SLB	41	46	46	47	47	5,04

NO	Uraian	APM (Tahun)					Pertumbuhan /Tahun%
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	Jumlah Siswa SLB	2.654	2.940	3.159	3.375	3.301	11,67
3	Jumlah Guru SLB	475	945	561	598	618	9,05
4	Jumlah Ruang Kelas SLB	386	497	490	624	663	9,54
5	Jumlah Romber SLB	573	571	631	683	661	1,75

sumber data : Publikasi Data Kemendikbud, Tahun 2021

Perkembangan jumlah sekolah luar biasa di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 41 sekolah tahun 2016 menjadi 47 sekolah tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,04 persen. Penambahan jumlah sekolah ini, diikuti dengan penambahan jumlah siswa, guru ruang kelas dan rombongan belajar, dimana jumlah siswa tahun 2016 sebanyak 2.654 siswa menjadi 3.301 siswa dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 11,67 persen. Sedangkan guru SLB tahun 2016 sebanyak 475 guru bertambah menjadi 618 guru pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 9,05 persen. Terhadap jumlah ruang kelas dan jumlah rombongan belajar sama-sama mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 9,54 persen dan 1,75 persen.

Pemenuhan jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, kewajiban pemenuhan beban mengajar dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum.

Adanya SLB mengajarkan anak mengenai berbagai keterampilan dan kemampuan dasar agar dapat mengikuti kurikulum pendidikan di sekolah umum. SLB tidak hanya menggiatkan pendidikan mata pelajaran melainkan pula pendidikan keterampilan yang cocok dengan kebutuhan khusus masing - masing anak. Jumlah SLB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Jumlah SLB menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Status		Jumlah
			Negeri	Swasta	
1	Bengkalis	Mandau	1	5	6
		Pinggir	0	1	1
		Bengkalis	1	1	2
		Sub Total	2	7	9
2	Indragiri Hilir	Tembilahan	1	0	1
		Pulau Burung	0	1	1
		Sub Total	1	1	2
3	Indragiri Hulu	Pasir Penyu	1	0	1
		Sub Total	1	0	1
4	Kampar	Bangkinang Kota	2	0	2
		Gn. Sahilan	1	0	1
		Bangkinang	1	0	1
		Sub Total	4	0	2
5	Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi	1	0	1
		Tebing Tinggi Timur	0	2	2
		Rangsang Barat	0	1	1
		Sub Total	1	3	4
6	Kuantan Singingi	Kuantan Tengah	1	0	1
		Sub Total	1	0	1
7	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1	0	1
		Pangkalan Kuras	1	0	1
		Sub Total	2	0	2
8	Rokan Hilir	Bangko	1	0	1
		Sub Total	1	0	1
9	Rokan Hulu	Ujung Batu	0	1	1
		Rambah Hilir	0	1	1
		Rambah	1	0	1
		Sub Total	1	2	3
10	Siak	Tualang	0	2	2
		Siak	1	0	1
		Sub Total	1	2	3
11	Dumai	Dumai Timur	1	1	2
		Dumai Selatan	0	1	1
		Sub Total	1	2	3
12	Pekanbaru	Tenayan Raya	1	1	2
		Marpoyan Damai	0	3	3
		Payung Sekaki	0	1	1
		Rumbai	0	1	1
		Rumbai Pesisir	0	2	2
		Sail	0	1	1
		Sukajadi	0	1	1
		Tampan	0	3	3
		Sub Total	1	13	14
		Total	**17**	**30**	**47**

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, untuk tingkat kabupaten/kota terdapat sejumlah sekolah dengan status negeri sebanyak 17 sekolah dan berstatus swasta sebanyak 30 sekolah, sehingga total untuk satuan pendidikan SLB di Provinsi Riau berjumlah 47 sekolah. Jumlah sekolah luar biasa terbanyak di Kota Pekanbaru (14 sekolah) dan paling sedikit di Kabupaten Indragiri Hulu (1 sekolah), Kuantan Singingi (1 sekolah) dan Rokan Hilir (1 sekolah).

2.3.3. Indikator Kinerja Terhadap Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

1) Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi

Status akreditasi Satuan Pendidikan terdiri atas status terakreditasi dan tidak terakreditasi. Peringkat terakreditasi tersebut terdiri atas : terakreditasi A (unggul); terakreditasi B (baik); terakreditasi C (cukup). Peringkat terakreditasi Satuan Pendidikan mencakup kelayakan seluruh program yang diselenggarakan pada saat Akreditasi yang disertai dengan penjelasan hasil Akreditasi sehingga Satuan Pendidikan dan para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti hasil Akreditasi. Untuk melihat kondisi persentase seluruh satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang telah terakreditasi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	63,20	92,92	93,32

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

2) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. Untuk melihat kondisi Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Riau Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah	75,68	76,52	77,27	77,29	77,42

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

3) Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Akses Pendidikan

Kemudahan akses Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus merupakan amanat negara kepada pemerintah provinsi menjamin kesamaan hak bagi seluruh anak termasuk mereka yang mengalami kondisi khusus. Hal ini juga merupakan salah satu standar pelayanan minimal Pendidikan yang diamanatkan bagi Pemerintah Provinsi yang secara khusus akan disajikan pada bagian SPM pada BAB ini. Untuk melihat kondisi persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Akses Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Akses Pendidikan	NA	23,00

sumber data : BPMP Provinsi Riau, Tahun 2021

4) Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B

Untuk melihat kondisi persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B Provinsi Riau Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B	85,00	85,38

sumber data : Badan Akreditasi Provinsi Riau, Tahun 2021

5) Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal

Pembelajaran dan kurikulum muatan lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada peserta didik. Selain itu, muatan lokal juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut. Untuk melihat kondisi sekolah yang menerapkan persentase kurikulum muatan lokal Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal Provinsi Riau Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	70,00	70,00

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

6) Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Selain sarana dan prasarana, hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian rasio antara kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibandingkan dengan peserta didik. Untuk melihat kondisi rasio kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Riau Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	58	59

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

7) Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang mengajukan perizinan terlayani

Sarana dan prasarana Pendidikan tidak selamanya akan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka perlu pihak ketiga diantaranya masyarakat dalam membangun prasarana Pendidikan. Untuk melihat kondisi persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Mengajukan Perizinan Terlayani Provinsi Riau Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Mengajukan Perizinan Terlayani	80	88	100

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

2.3.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, sedangkan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2.26
SPM Pendidikan Menengah

NO	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak yang bersekolah usia 16-18 tahun	154.344	160.783	164.971
2	Jumlah Penduduk/Jumlah anak usia sekolah usia 16-18 Tahun	199.746	208.026	213.887
% Capaian		**77,27**	**77,29**	**77,13**

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Permasalahan utama dalam bidang pendidikan adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan masih rendahnya kualitas pendidikan serta angka partisipasi sekolah hingga tahun 2020. Hal ini terlihat dari masih terdapat sebanyak 22,87% anak usia SLTA (16-18 tahun) yang belum dan tidak bersekolah.

Tabel 2.27
SPM Pendidikan Khusus

NO	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak Disabilitas yang bersekolah usia 4-18 tahun	3.077	3.291	3.323
2	Jumlah Penduduk/Jumlah anak disabilitas usia sekolah usia 4-18 Tahun	3.517	3.750	3.775
% Capaian		87,49	87,76	88,03

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Persentase capaian anak disabilitas yang bersekolah meningkat 0,54 poin tiga tahun terakhir dari 87,49% tahun 2018 menjadi 88,03% tahun 2020. Pendidikan khusus yang dapat diterapkan oleh pemerintah dapat berupa pendidikan inklusi, yakni model pendidikan yang memberi kesempatan bagi anak disabilitas untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak disabilitas. selanjutnya capaian target SPM Urusan Pendidikan berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
SPM Pendidikan

NO	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Capaian di Tahun 2021	2021
1	Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	77,81
2	Jumlah Anak Usia 4-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	23,98
3	Rata-rata Kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	1,83
4	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	1,69
5	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1,81
6	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	1,67
7	Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,91
8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,83
9	Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	2,07
10	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	1,99
11	Rata-rata Kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	1,82
12	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	1,80
13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	49,55
14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	76,9

Sumber Data : Kemendikbudristek RI (BPMP Provinsi Riau) Tahun 2021

Persentase capaian tertinggi adalah 77,81 untuk anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) dan selanjutnya

diikuti dengan Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK yang mencapai 76,9 di tahun 2021.

2.3.5. Suistanable Development Goals (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Kesepakatan Pembangunan Baru yang mendorong Perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan Sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pada Bulan September 2020 telah dipublikasikan Meta Data Edisi II indikator TPB/SDGs yang merupakan peyempurnaan dari Meta Data Edisi I. Urusan Pendidikan dalam hal ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan 4 yaitu Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Adapun data rincian masing-masing indikator adalah sebagai barikut :

Tabel. 2.29
Rincian Kondisi Indikator SDGs Urusan Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
	Nama Target : 4.1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Disdik	NA	NA	NA	Edisi 2 AKM : Tahunan PISA : 3 Tahunan Nasional, Provinsi
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	BPS	PM	PM	96,91 87,11 68,94	Edisi 2 Tahunan Nasinal, Provinsi, Kabupaten/Kota

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	BPS	NA	-	-	Edisi 2 Tahunan Nasinal, Provinsi, Kabupaten/Kota
	Nama Target : 4.2.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.					
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Kementerian Kesehatan	NA	-	-	Edisi 2 5 Tahunan Nasional, Provinsi
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	BPS	NA	91,44	90,75	Edisi 2 Tahunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
	Nama Target : 4.3.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.					
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	BPS	NA	-	-	Edisi 2 3 Tahunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	33,93	35,07	35,97	Edisi 2 Tahunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
	Nama Target : 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.					

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	-	-	-	Edisi 2 Tahunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
(1)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	82,03	84,61	93,14	Edisi 2
(2)	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	BPS	55,37	62,67	70,69	Edisi 2
	Nama Target : 4.5.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.					
4.5.1.*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan(ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat,SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c)kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	BPS				Edisi 2 Tahunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
(1)	Rasio APM-SD antara Perempuan	BPS	NA	NA	108,17	Edisi 2

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
	dan laki-laki					
(2)	Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan:	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
(3)	Rasio APM-SD antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi:	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
(4)	Rasio APM-SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
(5)	Rasio APK antara Perempuan dan lakilaki	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
(6)	Rasio APK antara Pedesaan dan Perkotaan	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
(7)	Rasio APK antara Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi:	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
(8)	Rasio APK antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	BPS	NA	NA	NA	Edisi 2
	Nama Target : 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	99.21	99.23	99,20	Edisi 1 dan 2 Tahunan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
	Nama Target : 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta penyediaan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua					
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis	Dinas Pendidikan				Edisi 2 Tahunan, Nasional, Provinsi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
	kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).					
(1)	Jumlah sekolah dasar (SD/MI/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Dinas Pendidikan	PM	-	-	Edisi 2
(2)	Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Dinas Pendidikan	PM	-	-	Edisi 2
(3)	Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Dinas Pendidikan	PM	-	-	Edisi 2
4.a.1 (a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pendidkan	NA	-	-	Edisi 2 Survey Lingkungan Belajar : Tahunan PISA : 3 Tahunan Nasional, Provinsi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
	Nama Target : 4.b. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.					
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	NA	-	-	Edisi 2 Tahunan Negara
	Nama Target : 4.c.Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.					
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan	NA	-	-	Edisi 2 Tahunan Nasional, Provinsi
(1)	Jumlah guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang berkualifikasi S1/ D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada jenjang yang sama, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).	Dinas Pendidikan	NA	-	-	Edisi 2
(2)	Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru	Dinas Pendidikan	NA	-	-	Edisi 2

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	2019	2020	2021	Keterangan
	pada tingkatan tertentu* dan dinyatakan dalam satuan persen (%).					

sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2021

Visi Gubernur Riau terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (RIAU BERSATU). Misi Gubernur Riau untuk Pendidikan adalah misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan Gubernur Riau meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Riau dalam Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau bertujuan menyelenggarakan Pendidikan wajib belajar 12 Tahun. Untuk memenuhi Tujuan SDGs yang keempat yaitu memastikan dapat dicapai melalui program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah untuk Pencapaian Indikator 4.1.2*, 4.1.2(a) 4.5.1, 4.a.1(a), 4.c.1*(1) dan 4.c.1*(2), dibidang Pendidikan Menengah yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Dengan adanya Program dan Kegiatan bidang Pendidikan mendukung visi dan misi Gubernur Riau akan berdampak positif terhadap capaian program nasional terutama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sehingga akan meningkat indeks Pembangunan manusia (IPM) meningkatkan RLS dan meningkatkan HLS di Provinsi Riau.

2.3.6. Revitalisasi SMK

Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia mengamanatkan bahwa ruang lingkup Revitalisasi SMK dalam bentuk bantuan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan, pemagangan di industri dan penyelarasan kurikulum untuk disesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri disamping juga diperlukan penataan kelembagaan meliputi program kejuruan yang dibuka dan penentuan lokasi.

Tabel. 2.30
Kondisi Revitalisasi SMK di Provinsi Riau Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	SMK			Siswa SMK		
		NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Kab. Kuantan Singingi	10	54	64	12.398	16.823	29.221
2	Kab. Indragiri Hulu	13	20	33	4.500	2.423	6.923
3	Kab. Indragiri Hilir	15	11	26	5.383	1.621	7.004
4	Kab. Pelalawan	12	5	17	6.410	1.186	7.596
5	Kab. Siak	8	11	19	3.847	1.434	5.281
6	Kab. Kampar	12	1	13	4.789	368	5.157
7	Kab. Rokan Hulu	7	10	17	5.046	2.130	7.176
8	Kab. Bengkalis	23	16	39	6.171	3.402	9.573
9	Kab. Rokan Hilir	6	21	27	1.598	5.460	7.058
10	Kab. Kepulauan Meranti	8	10	18	4.680	1.228	5.908
11	Kota Pekanbaru	12	14	26	4.876	2.389	7.265
12	Kota Dumai	2	6	8	1.066	655	1.721
JUMLAH		128	179	307	60.764	39.119	99.883

sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Secara legalitas belum terdapat regulasi khusus terkait pendidikan vokasi di Provinsi Riau, namun telah disusun dokumen Peta Jalan (Road Map) Pengembangan SMK yang memberi arah pengembangan SMK di Provinsi Riau Tahun 2020-2027. Kondisi satuan pendidikan menengah tahun 2020 dari 766 sekolah terdapat SMK sebesar 38,12% atau 292 sekolah.

Revitalisasi SMK di Provinsi Riau dalam bentuk bantuan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dengan pelatihan, pemagangan di industri dan penyelarasan kurikulum untuk disesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri serta diberikan pendampingan oleh perguruan tinggi vokasi, hal ini sesuai dengan Implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, maka yang menjadi tantangan dan peluang dalam bidang pembangunan pendidikan antara lain :

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Pendidikan di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Di era globalisasi ini, Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan dan peluang di bidang pendidikan karena harus bersaing dan dituntut agar output pendidikan dapat mengikuti perkembangan.
2. Tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah menuntut manusia yang mandiri sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecakapan hidup (lifeskill) melalui proses belajar dan aktifitas yang memadai, proses pembelajaran, seorang guru atau pendidik yang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam menentukan model dan metode yang tepat agar pembentukan kecakapan hidup siswa berhasil, pembentukan kecakapan hidup tentu saya diarahkan dan berlandaskan potensi hidup dan budaya provinsi riau, memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan diharapkan mampu mencapai keberhasilan pendidik sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Riau.
3. Tantangan selanjutnya yaitu mana yang belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan, program wajib belajar 12 tahun yang belum berjalan secara maksimal dan fleksibilitas anggaran dana pemerintah daerah untuk pendidikan relatif terbatas untuk pembangunan pendidikan.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Pendidikan

Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dihadapkan pada hambatan dan tantangan di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang dan faktor pendorong bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan
4. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil
5. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
6. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program *Corporate Social Responbility* (CSR) untuk pendidikan.
7. Meningkatnya Partisipasi Potensi Dunia Usaha dan Industri di Provinsi Riau dalam proses Pengembangan Pendidikan Kejuruan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pendidikan

Permasalahan yang ditemukan tentu perlu menjadi bahan antisipasi agar dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan hingga akhir periode Renstra Dinas Pendidikan dapat menjadi lebih baik. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya akses pendidikan	Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	Masih terbatasnya daya tampung pendidikan menengah dan layanan khusus
			Masih rendahnya kualitas ruang kelas
		Masih terdapat calon peserta didik/ peserta didik yang sulit menjangkau akses layanan pendidikan	Masih terbatasnya pembiayaan operasional sekolah yang dianggap memberatkan peserta didik
			Masih terdapat daerah yang secara teknis belum dapat didirikan sekolah menengah
2.	Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan	Masih rendahnya kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
			Belum optimalnya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan khusus
		Belum Optimalnya Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	Belum optimalnya kerjasama pendidikan kejuruan dengan Dunia Usaha Dunia Industri
			Masih rendahnya manajemen sekolah berbasis vokasi
			Masih belum terpenuhinya sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu **Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia** (RIAU BERSATU). Visi tersebut memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari;

Sejahtera : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran;

Bermartabat : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya Melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat;

Unggul : Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanaan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan makna tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau berperan dalam mewujudkan Riau yang berdaya saing terutama dalam kemapanan sumber daya manusia yang handal. Dalam mewujudkan Visi tersebut dirumuskan 5 Misi, Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 1 yaitu Mewujudkan Sumber Daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Pada misi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap pencapaian pembangunan bidang pendidikan yang berkeadilan khususnya pada sasaran meningkatnya angka rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka harapan lama sekolah, meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bermutu, kesesuaian dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan menengah, Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Pendidikan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG PELAYANAN PENDIDIKAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Permasalahan Pelayanan PD		Faktor			
		Penghambat		Pendorong	
1.	**Belum meratanya akses pendidikan**	1.	Akses dan daya tampung yang masih belum	1.	Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang

Permasalahan Pelayanan PD		Faktor			
		Penghambat		Pendorong	
			maksimal		Penyelenggaraan Pendidikan
		2.	Terdapat kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik	2.	Tersedianya Dana pemenuhan layanan pendidikan dengan mandatori 20% dari APBD ditambah dengan pendanaan bersumber lain yang sah
		3.	Masih terdapat usia sekolah pada peserta berkebutuhan khusus yang belum atau tidak bersekolah		
		4.	Masih terdapat orang tua dan siswa yang bermotivasi rendah terhadap Pendidikan	3.	Adanya dukungan masyarakat, organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan
		5.	Masih terdapat masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah		
		6.	Faktor geografi (Jarak sekolah yang jauh)		
2	**Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan**	1.	Masih terdapat Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Rendah	1.	Tersedianya Pendanaan Untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		2.	Penyediaan media belajar siswa masih belum maksimal	2.	Tersedianya pendanaan untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa
		3.	Ketidaksesuaian Pendidikan Kejuruan dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	3.	Adanya Dukungan Masyarakat, Organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan
		4.	Ketidaksiapan kemampuan kognitif dan teknikal untuk		

Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
	melanjutkan Pendidikan	

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Untuk itu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan nawacita kedua adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infastruktur dan teknologi.
2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2020-2024 adalah:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusi;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan anak;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;

5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, trasparan dan akuntabel.

Sedangkan yang menjadi sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu disemua jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang;
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan;
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemdikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi disemua jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, kebijakan merdeka belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek RI untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Peningkatan Budaya, Bahasa, dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

Faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan pendidikan yang dapat mempengaruhi sasaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3
FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG PELAYANAN PENDIDIKAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SASARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Permasalahan Pelayanan PD		**Faktor**			
		Penghambat		**Pendorong**	
1.	**Belum meratanya akses pendidikan**	1.	Akses dan daya tampung yang masih belum maksimal	1.	Terdapatnya arah kebijakan Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
		2.	Kebutuhan operasional Satuan Pendidikan besar tidak dapat ditampung oleh APBD	2.	Terdapatnya arah kebijakan Penguatan Tata Kelola Pendidikan
2.	**Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan**	1.	Belum terpenuhinya kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	1.	Terdapatnya arah kebijakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
		2.	Belum relevannya lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha	2.	Terdapatnya arah kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan

3.3.2. Telaahan Renstra Renstra Kab/Kota

Telaah Renstra perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pendidikan secara ringkas dilihat dengan menyajikan penentuan isu strategis serta tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagai berikut:

TABEL 3.4
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1.	Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022	1. Akses : a. Peningkatan ketersediaan layanan PAUD di Kota Pekanbaru. b. Peningkatan angka partisipasi PAUD c. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan terutama di pedesaan terhadap pentingnya PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age). d. Peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan bagi anak keluarga prasejahtera.	1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan
		2. Peluang : a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di kota Pekanbaru pada tahun 2016 adalah 97,69% dan (96,54%), APK dan APM untuk pendidikan dasar (SD/MI) 113,86% dan 105,73%, APK dan	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		APM untuk sekolah menengah pertama (SMP/MTs) 100,61% dan 96,28%. b. Adanya dukungan kebijakan untuk melaksanakan PAUD holistik dan integratif antara lain strategi nasional pelaksanaan PAUD; undang-undang terhadap pendidikan dan perkembangan anak (0-6 tahun); standar nasional PAUD (permendikbud 58/2009) dan lain-lain c. Adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi tenaga PAUD meskipun jumlahnya masih terbatas d. Menurunnya kesenjangan antar kelompok ekonomi pada pendidikan dasar		
		3. Mutu : a. Sebagian komponen sistem penjaminan kualitas pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar tidak selaras dengan filosofi dimana aspek operasional sekolah merupakan indikator terbaik kualitas pendidikan. b. Adanya beberapa kekhawatiran bahwa SPM yang akan di terapkan ke depan sangat		

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		ambisius. c. Pendataan dan pengolahannya di semua tingkat belum cukup mendukung perencanaan untuk pencapaian SPM pendidikan dasar d. Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan dan staf sekolah terhadap SPM e. Perlunya kejelasan peran masing masing jenjang pemerintahan dan kementrian serta lembaga dalam pengelolaan SPM f. Kapasitas pemerintah yang belum sepenuhnya baik g. Peningkatan kesejahteraan guru belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran h. Ujian nasional tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan		
		4. Tata Kelola: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. b. Peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah c. Peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah d. Menigkatkan kualitas data dan informasi		

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		Pendidikan e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan Pendidikan f. Pelaksanaan penerapan pendanaan dan pembiayaan pendidikan berbasis kinerja g. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan Pendidikan h. Peningkatan efisiensi dan efektifitas mekanisme pembiayaan pendidikan.		
2.	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022	1. Masih belum maksimalnya penataan dan pemerataan guru	1. Mewujudkan pendidikan yang bermutu	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan pendidikan
		2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		3. Masih tingginya persentase jumlah ruang belajar dalam kondisi rusak dan kebutuhan ruang belajar		
		4. Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata		Meningkatnya Kualitas lulusan SD/SMP
		5. Masih rendahnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	2. Mewujudkan aksesibilitas pendidikan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berstandar

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		6. Kurangnya pembinaan terhadap kreatifitas dan pendidikan akhlak bagi generasi muda		Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat
3	Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023	1. Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang masih belum memadai yang disebabkan oleh: a. Daya tampung Ruang Kegiatan Belajar belum memadai, b. Banyaknya kondisi ruang kelas dalam keadaaan rusak, c. Kurangnya fasilitas pendukung pendidikan.	1. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
		2. Kualifikasi pendidikan/kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang belum memadai yang disebabkan oleh Kualifikasi guru yang belum optimal.	2. Meningkatnya Mutu/ Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Formal dan Non-Formal yang merata dan berkeadilan
		3. Kualitas kegiatan pembelajaran yang belum optimal yang disebabkan oleh: a. Kekurangan guru mata pelajaran tertentu, b. Distribusi tenaga pengajar yang belum merata.		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
4	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026	Peningkatan Mutu dan Pemerataan Guru	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
5	Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	Belum Optimalnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan	Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan	Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan masih Rendah
		Masih Rendahnya Kualitas Pendidikan		Keterbatasan Penyediaan Fasilitas Pendidikan yang bermutu
			Belum Optimalnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan	Keterjangkauan dalam mendapatkan layananan pendidikan masih sulit
6	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026	1. Mutu/Kualitas Pendidikan: a. Angka putus sekolah jenjang SD dan SMP relatif masih tinggi. b. Kualitas pelayanan belum optimal di bidang sarana dan prasarana untuk semua jenjang	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. c. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD serta SMP belum mencapai target d. Kurikulum Muatan Lokal belum optimal memasukkan Budaya Melayu Riau e. Masih terdapat peserta didik yang tidak mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2. Kuantitas serta Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan: a. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia, b. Persentase tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik S1 linier masih rendah, c. Kualitas tenaga kependidikan belum optimal d. Jumlah dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan e. Kesempatan pemerataan perempuan menduduki jabatan pimpinan kepala sekolah.		
7	Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan	1. Implementasi Wajib belajar 9 Tahun di kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Pendidikan

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
	Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026	2. Kesenjangan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan merata khususnya bagi masyarakat miskin, dan tinggal di daerah geografis yang sulit untuk menjangkau lokasi fasilitas pendidikan		Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan
		3. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menambah beban pengeluaran orang tua karena rendahnya kemampuan ekonomi		
		4. Pemerataan kualitas pendidikan melalui penataan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimial		
		5. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan		
		6. Perubahan kebijakan pendidikan yang dinamis serta proses adaptasi perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar		
8	Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan	1. Pemerataan dan Akses Pendidikan	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya pemerataan kualitas dan tata Kelola
		2. Peningkatan mutu pendidikan		

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
	Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026	3. Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan		pendidikan dasar sembilan tahun
9	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026	1. Perlunya peningkatan pemerataan mutu pendidikan ditinjau dari pemenuhan akses Pendidikan	Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat yang berkeadilan	Mewujudkan pemerataan layanan pendidikan
		2. Perlunya peningkatan mutu pendidikan ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana pendidikan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidikan
		3. Perlunya pemerataan tenaga guru dan kependidikan Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang antara pedesaan dan perkotaan		
		4. Masih perlunya mempertahankan pelaksanaan pendidikan informal dan non formal untuk mewujudkan bebas buta aksara		
		5. Perlunya peningkatan jumlah tenaga pendidik yang belum seimbang antara jumlah dan kompetensi		
10	Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026	1. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki menyelesaikan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Meningkatkan akses Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		2. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar		Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan
		3. Menjamin kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan bagi seluruh siswa dalam meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas		
		4. Meningkatkan kompetesi dan kualifikasi guru dan Tenaga Kependidikan		
11	Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, melayani dan inovatif	Meningkatkan Kapasitas SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya dan Terjaminnya Mutu Pendidikan
		2. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		3. Penurunan angka putus Sekolah		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan
		4. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana pendidikan yang sesuai standar dan layak		
12	Perubahan RENSTRA	1. Belum optimalnya aksesibilitas dan sarana dan	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya partisipasi

NO	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA (Periode Renstra)	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021-2026	prasarana Pendidikan	Pelayanan Pendidikan	dan kualitas pendidikan
		2. Belum meratanya jumlah dan kualitas sekolah di tingkat dasar	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terwujudnya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan wewenang kota
		3. Belum meratanya kualitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar	Terpenuhinya lulusan yang memiliki kompetensi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar

Dari telaahan 12 Renstra perangkat daerah yang menjalankan Urusan Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, terutama telaahan terhadap isu strategis, tujuan, dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan permasalahan utama terkait dengan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

a. Belum meratanya akses dan mutu layanan Pendidikan dasar (SD dan SLTP) berdampak langsung terhadap akses dan mutu layanan Pendidikan menengah (SMA dan SMK).
b. Belum tergambarkan pendidikan penyetaraan yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan akses layanan pendidikan termasuk bagi penduduk usia sekolah menengah.

Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut adalah:

a. Adanya pembagian kewenangan pada urusan Pendidikan antara Provinsi (jenjang Menengah dan layanan khusus) dan Kabupaten Kota (jenjang dasar dan pendidikan penyetaraan).
b. Masih kurangnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pemenuhan akses layanan Pendidikan menengah antara lain penyediaan akses ke satuan Pendidikan dan penyediaan lahan pembangunan sekolah yang menjadi kewenangan provinsi.

Adapun faktor pendorong dari pelaksanaan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut adalah:.

a. Telah Diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Tersedianya Dana pemenuhan layanan pendidikan dengan mandatori 20% dari APBD ditambah dengan pendanaan bersumber lain yang sah.
c. Dukungan masyarakat, organisasi, perusahaan terhadap pendidikan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau diamanatkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi yaitu mewujudkan Ruang yang Produktif, Efisien, Nyaman dan Berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka. Salah satu kebijakan penataan ruang yaitu menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem dengan salah satu strateginya yaitu meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi sesuai dengan tatanan sosial dan lingkungan hidup perkotaan. Dinas Pendidikan perlu memperhatikan pemanfaatan ruang wilayah dalam peraturan daerah tersebut dimana perwujudan pemantapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan/atau tinggi serta kejuruan harus berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.

Selanjutnya terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak termasuk dalam kajian dimaksud. KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum meratanya akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi maupun jarak lokasi sarana dengan tempat tinggal baik bagi pendidikan menengah secara umum maupun pendidikan khusus. Ditambah adanya Covid-19 yang mengharuskan pembelajaran secara daring yang memerlukan peningkatan infrastruktur pendidikan secara digital untuk menghindari *loss education* bagi penduduk usia sekolah;
2. Belum optimalnya mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini disebabkan ketersediaan media pendidikan yang belum terpenuhi, ketersediaan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan distribusinya belum merata, serta belum relevannya lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran dalam upaya pencapaian Misi Daerah. Sebelum perubahan Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra dan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Renstra				Perubahan Renstra			
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	-Rata-Rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	- APK SMA/ MA/ SMK/ SMLB/ Paket C (%) - APM SMA/MA/ SMK/ SMLB /Paket C (%) - Angka Putus Sekolah	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	- Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur >25 Tahun - Harapan Lama Sekolah	- Meningkatnya Akses Pendidikan	- APK SM Sederajat - APM SM Sederajat - Angka Putus Sekolah SM Sederajat
		Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1			- Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	- Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi
		Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Serta Peningkatan Mutu serta Peningkatan Mutu Siswa/ Peserta Didik	- Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B - Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B				

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang ingin dicapai sesuai format tabel T-C. 25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 4.2.a. Tujuan dan

Sasaran Jangka Menengah sebelum perubahan dan tabel 4.2.b Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah setelah perubahan sebagai berikut :

Tabel 4.2.a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
(Sebelum Perubahan)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2020 *)	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun			1	Rata-rata Lama Sekolah	9,14	-	-	-	-
				2	Harapan Lama Sekolah	13,20	-	-	-	-
		1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (%)	84,61	-	-	-	-
				2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (%)	64,01	-	-	-	-
				3	Angka Putus Sekolah	0,76	-	-	-	-
		2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	96,00	-	-	-	-
		3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	86,50	-	-	-	-
				2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	81,19	-	-	-	-

*) *Data Capaian*

Tabel 4.2.b
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau
(Setelah Perubahan)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
			2020*)	2021*)	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat		Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur > 25 tahun (tahun)	9,14	9,19	9,24-9,30	9,29-9,35	9,35-9,40
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,20	13,28	13,37-13,47	13,44-13,53	13,44-13,60
	Meningkatnya Akses Pendidikan	- APK SM Sederajat	84,61	88,90	90,40	91,90	92,40
		- APM SM Sederajat	64,01	64,00	66,36	67,88	68,00
		- Angka Putus Sekolah SM Sederajat	0,76	0,94	0,74	0,73	0,70
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	- Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	93,32	93,71	94,12	94,52	94,92

**) Data Capaian*

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pendidikan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan pendidikan terkait dengan cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis. Telaah terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Provinsi Riau.

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis berupa arah kebijakan. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

Untuk menunjukkan Relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Sebagaimana format tabel T-C.26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 5.1.a. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan sebelum perubahan dan tabel 5.1.b. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan setelah perubahan sebagai berikut:

Tabel 5.1.a

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

(Sebelum Perubahan)

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)					
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.					
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun	1.	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan	a.	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
			2. Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin	a.	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Yang Kurang Mampu
	2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a.	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Bagi Tenaga Pendidik
	3.	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan serta peningkatan mutu siswa	a.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan Mutu sesuai Standar Mutu Pendiidkan dan Standar Pelayanan Minimal
			2. Optimalisasi terhadap implementasi regulasi pendidikan	a.	Meningkatkan proses pembelajaran
				b.	Meningkatkan Kompetisi / Daya Saing Peserta Didik
			3. Peningkatan kemampuan guru agar proses pembelajaran berkualitas	a.	Optimalisasi kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
				b.	Menyusun regulasi penyelenggaraan SMK dan Pembentukan Tim Revitalisasi SMK
			4. Meningkatkan Relevansi Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Kerja	a.	Optimalisasi Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Meningkatkan Keahlian Peserta Didik

Tabel 5.1.b

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

(Setelah Perubahan)

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)						
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.						
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Meningkatnya Akses Pendidikan	1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	a.	Membangun USB dan RKB
					b.	Meningkatkan kualitas ruang kelas
			2	Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan	a.	Pemenuhan operasional sekolah
					b.	Pendirian layanan khusus pendidikan (Sekolah menengah terbuka)
	2	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan	1	Peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	a.	Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi
					b.	Meningkatkan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					c.	Meningkatkan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik
			2	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan	a.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan menengah
					b.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang dan utilitas pendidikan layanan khusus
			3	Peningkatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan	a.	Meningkatkan kerjasama pendidikan kejuruan dengan DUDI
					b.	Meningkatkan manajemen sekolah berbasis vokasi
					c.	Meningkatkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan DUDI

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 telah digunakan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, sehingga Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 juga mengacu pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD tersebut.

Tabel T-C.24 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel 2.8.a yang menyajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015 dan tabel 2.8.b yang menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut :

Pada bagian ini akan disajikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 6.1.a. yang menyajikan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 (Sebelum Perubahan) dan Tabel 6.1.b yang menyajikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Setelah Perubahan). Adapun uraian dari bab ini adalah sebagai berikut :

6.1 Program kegiatan sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Pada Renstra sebelum perubahan rumusan program dan kegiatan secara garis besar sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 6 (enam) terdiri dari 2 (dua) Program Non Urusan dan 4 (empat) Program Urusan
- Jumlah Kegiatan sebanyak 180 kegiatan

  Uraian masing - masing program dan kegiatan secara ringkas sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

   Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran :

   • Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

   • Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta Peningkatan Mutu Siswa / Peserta Didik.

   Adapun Indikator Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagai berikut :

   a. APK SMA Sederajat.
   b. APM SMA Sederajat.
   c. Akreditasi sekolah SMA Sederajat dengan nilai minimal B.

   Program ini terdiri dari : 91 kegiatan.

2. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

   Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Adapun indikator program sebagai berikut:

   a. Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan.

   Program ini terdiri dari : 37 kegiatan.

3. Program Bantuan Operasional Sekolah

   Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Adapun indikator program sebagai berikut:

a. Menurunnya angka putus sekolah.

Program ini terdiri dari : 4 kegiatan.

4 . Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun indikator program sebagai berikut :

a. Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat kependidikan > D4/S1

b. Jumlah siswa miskin yang dibantu

c. Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa

Program ini terdiri dari : 25 kegiatan.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini terdiri dari : 17 kegiatan.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut :

a. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari : 6 kegiatan.

6.2 Program kegiatan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Sedangkan pada Perubahan Renstra rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara garis besar sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan dan 4 (empat) Program Urusan

- Jumlah Kegiatan sebanyak 14 kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 110 sub kegiatan

  Uraian masing - masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara ringkas sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran:

- Meningkatnya Akses Pendidikan
- Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Adapun Indikator Program Pengelolaan Pendidikan sebagai berikut :

- Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapatkan Akses Pendidikan
- Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi Minimal B

Program ini terdiri dari : 3 kegiatan dan 85 sub kegiatan.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan. Adapun indikator program sebagai berikut : Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal.

Program ini terdiri dari : 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan. Adapun indikator program sebagai berikut : Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

Program ini terdiri dari : 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung sasaran Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan. Adapun indikator program sebagai berikut :

Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Mengajukan Perizinan Terlayani.

Program ini terdiri dari : 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

   Adapun Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan.

   Program ini terdiri dari : 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan sesuai Tabel T-C.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel 6.1.a Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 dan Tabel 6.1.b Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024.

Tabel 6.1.a
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Riau
Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		0.0.00.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100 Persen	100 Persen	**16,673,313,849.00**
		00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	-	9000 Surat	150,000,000.00
		00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12	12 Rekening	1,999,965,000.00
		00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	54 Unit	578,160,000.00
		00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12 Bulan	969,012,000.00
		00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	16 Unit	300,000,000.00
		00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	12	35 Jenis	1,200,000,000.00
		00.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	12	17 Jenis	1,174,650,050.00
		00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	9 Jenis	100,000,000.00
		00.01.010.	Penyediaaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	1887 Porsi	1,328,086,799.00
		00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	418 Kali	1,800,000,000.00
		00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	-	235 OB	4,213,440,000.00
		00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	-	23 OB	360,000,000.00
		00.01.021.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional I	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		00.01.022.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional II	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500,000,000.00
		00.01.023.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional III	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500,000,000.00
		00.01.024.	Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah Regional IV	Terselenggaranya cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau	-	12 Bulan	500,000,000.00
		00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	-	80 Persen	500,000,000.00
		0.0.00.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	100 Persen	100 Persen	**1,820,000,000.00**
		00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	18 Unit	220,000,000.00
		00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	-	6 Unit	250,000,000.00
		00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	12	15 Ruang	500,000,000.00
		00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	-	5 Unit	200,000,000.00
		00.02.014.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15	12 Unit	400,000,000.00
		00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20	45 Unit	250,000,000.00
Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun	**Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**	**1.1.01.15.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH**	**APK SMA Sederajat**	83,87 Persen;	85,26 Persen;	**309,434,262,403.00**
				APM SMA Sederajat	63,81 Persen;	67,17 Persen;	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
				Akreditasi sekolah SMA Sederajat dengan nilai minimal B	81,49 Persen;	82,63 Persen;	
		01.15.002.	Revitalisasi SMA Wilayah II	Jumlah Ruang SMA yang di Revitalisasi	-	2 Ruang	0
		01.15.003.	Revitalisasi SMA Wilayah III	Jumlah Ruang SMA yang di Revitalisasi	-	2 Ruang	0
	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta Peningkatan Mutu Siswa/peserta didik	01.15.004.	Revitalisasi SMA Wilayah IV	Jumlah Ruang SMA yang di Revitalisasi	-	2 Ruang	0
		01.15.006.	Rehabilitasi SMA Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	180 Ruang	6,490,814,850.00
		01.15.007.	Rehabilitasi SMA Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	300 Ruang	11,718,734,800.00
		01.15.008.	Rehabilitasi SMA Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	90 Ruang	2,728,385,000.00
		01.15.009.	Rehabilitasi SMA Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	120 Ruang	3,540,290,000.00
		01.15.010.	Rehabilitasi SMA Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas SMA yang di Rehabilitasi	-	70 Ruang	1,895,877,360.00
		01.15.013.	Pembangunan USB SMA Wilayah III	Jumlah Unit Sekolah Baru SMA yang dibangun	-	1 Sekolah	3,488,000,000.00
		01.15.014.	Pembangunan USB SMA Wilayah IV	Jumlah Unit Sekolah Baru SMA yang dibangun	-	1 Sekolah	3,465,638,750.00
		01.15.016.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	12 Ruang	3,915,000,000.00
		01.15.017.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	16 Ruang	5,035,000,000.00
		01.15.018.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	6 Ruang	1,890,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.15.019.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	10 Ruang	5,867,434,500.00
		01.15.020.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	4 Ruang	624,400,000.00
		01.15.021.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah I	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	13 Sekolah	2,597,790,000.00
		01.15.022.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah II	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	21 Sekolah	4,181,100,000.00
		01.15.023.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah III	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	14 Sekolah	2,784,600,000.00
		01.15.024.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Wilayah IV	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	16 Sekolah	3,198,400,000.00
		01.15.025.	Pengadaan Media Pembelajaran SMA Kota Pekanbaru	Jenis media pembelajaran yang di penuhi / Jumlah Sekolah yang terpenuhi alat bantu proses belajar mengajar	-	11 Sekolah	2,194,500,000.00
		01.15.027.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah I	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	13 Sekolah	1,495,000,000.00
		01.15.028.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah II	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	21 Sekolah	2,410,000,000.00
		01.15.029.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah III	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	14 Sekolah	1,600,000,000.00
		01.15.030.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Wilayah IV	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	16 Sekolah	1,842,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.15.031.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMA Kota Pekanbaru	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun/ Jumlah Sekolah yang memadai infrastrukturnya	-	11 Sekolah	1,244,100,000.00
		01.15.032.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	Jenis Sarana dan Prasarana Labor IPA / Jumlah Sekolah SMA yang terpenuhi Sarana dan Prasarana Labor IPA	-	105 Sekolah	6,650,000,000.00
		01.15.033.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah I	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubiliernya)	-	30 Ruang	3,105,000,000.00
		01.15.034.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah II	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubiliernya)	-	30 Ruang	3,100,000,000.00
		01.15.035.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah III	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubiliernya)	-	5 Ruang	530,000,000.00
		01.15.036.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Wilayah IV	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubiliernya)	-	26 Ruang	2,717,600,000.00
		01.15.037.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMA Kota Pekanbaru	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi / (Jumlah Ruang yang terpenuhi meubiliernya)	-	5 Ruang	513,000,000.00
		01.15.038.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah I	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	2 Ruang	940,000,000.00
		01.15.039.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah II	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	6 Ruang	2,550,000,000.00
		01.15.040.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah III	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	1 Ruang	430,000,000.00
		01.15.041.	Pembangunan Perpustakaan SMA Wilayah IV	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	2 Ruang	810,450,000.00
		01.15.042.	Pembangunan Perpustakaan SMA Kota Pekanbaru	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	-	0 Ruang	0
		01.15.043.	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMA Plus yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	300	450 Siswa	6,944,170,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.15.044.	Penyelenggaraan SMA Pintar	Jumlah Siswa SMA Pintar yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	216	250 Siswa	5,363,616,000.00
		01.15.045.	Sistem Informasi Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	Jumlah Sekolah yang Mendapat Sistem Aplikasi Peningkatan dan Monitoring Kemampuan Siswa SMAN Berbasis IT	10	15 Sekolah	2,257,750,000.00
		01.15.046.	Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah yang melaksanakan ramah anak	-	100 Sekolah	200,000,000.00
		01.15.047.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penyelenggaran SMA	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI , SINKRONISASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA DI 12 KAB/KOTA	-	1 Dokumen	250,000,000.00
		01.15.048.	Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu	Jumlah Siswa Tidak Mampu Yang Mendapatkan Sertifikasi Keahlian	-	100 Siswa	2,018,383,000.00
		01.15.049.	Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	Jumlah Siswa SMK Yang Mengikuti Kompetensi	-	10 Kompetensi Keahlian	2,132,140,000.00
		01.15.050.	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	400	400 Siswa	9,337,577,200.00
		01.15.051.	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMK Perikanan Provinsi Riau	160	120 Siswa	4,759,581,000.00
		01.15.052.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penyelenggaran SMK	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI, SINKRONISASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK DI 12 KAB/KOTA	-	1 Dokumen	350,000,000.00
		01.15.058.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah I	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	23 Set	3,300,000,000.00
		01.15.059.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah II	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	26 Set	2,750,000,000.00
		01.15.060.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah III	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	14 Set	1,650,000,000.00
		01.15.061.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Wilayah IV	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	31 Set	2,200,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.15.062.	Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	Jumlah Siswa yang Melaksanakan Magang di Perusahaan	-	65 Siswa	1,642,790,800.00
		01.15.063.	Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti ujian kompetensi SMK	-	5000 Siswa	270,000,000.00
		01.15.064.	Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika	Jumlah siswa yang mendapar sertifikasi	-	120 Orang	2,400,000,000.00
		01.15.065.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah I	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	3 Sekolah	731,100,000.00
		01.15.066.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah II	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	4 Sekolah	989,100,000.00
		01.15.067.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah III	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	4 Sekolah	979,100,000.00
		01.15.068.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Wilayah IV	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	4 Sekolah	989,100,000.00
		01.15.069.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung SMK Kota pekanbaru	Jenis infrastruttur Pendukung yang di Bangun	-	3 Sekolah	742,100,000.00
		01.15.070.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah I	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	2 Unit	1,018,700,000.00
		01.15.071.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah II	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	3 Unit	1,098,800,000.00
		01.15.072.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah IV	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	3 Unit	1,069,100,000.00
		01.15.073.	Pembangunan Perpustakaan SMK Wilayah III	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	2 Unit	1,078,700,000.00
		01.15.074.	Pembangunan Perpustakaan SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	-	1 Unit	438,650,000.00
		01.15.075.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah I	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	3 Ruang	509,000,000.00
		01.15.076.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah II	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	8 Ruang	514,000,000.00
		01.15.077.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah III	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	4 Ruang	289,900,000.00
		01.15.078.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Wilayah IV	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	8 Ruang	554,250,000.00
		01.15.079.	Pengadaan Mebeuler Sekolah SMK Kota Pekanbaru	Jenis Meubeler Sekolah yang di penuhi	-	2 Ruang	129,900,000.00
		01.15.080.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan I	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	6 Set	3,429,186,800.00
		01.15.081.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan II	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	3 Set	1,722,900,000.00
		01.15.082.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan III	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	1 Set	785,800,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.15.083.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Wilayan IV	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	6 Set	2,650,000,000.00
		01.15.084.	Pengadaan Sarana Prasarana,Alat Labor dan Alat Praktek Kota Pekanbaru	Jenis Sarana dan Prasarana Labor yang di Penuhi	-	1 Set	478,600,000.00
		01.15.085.	Rehabilitasi SMK Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	6 Ruang	1,251,650,000.00
		01.15.086.	Rehabilitasi SMK Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	4 Ruang	1,451,650,000.00
		01.15.087.	Rehabilitasi SMK Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	8 Ruang	1,661,650,000.00
		01.15.088.	Rehabilitasi SMK Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	10 Ruang	2,081,650,000.00
		01.15.089.	Rehabilitasi SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehabilitasi	-	0 Ruang	0
		01.15.090.	Revitalisasi SMK Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0
		01.15.091.	Revitalisasi SMK Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0
		01.15.092.	Revitalisasi SMK Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0
		01.15.093.	Revitalisasi SMK Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0
		01.15.094.	Revitalisasi SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas yang di Revitalisasi	-	0 Ruang	0
		01.15.095.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah I	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	6 Ruang	2,008,244,300.00
		01.15.096.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah II	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	9 Ruang	2,429,200,259.00
		01.15.097.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah III	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	4 Ruang	1,213,134,396.00
		01.15.098.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Wilayah IV	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	6 Ruang	1,572,821,388.00
		01.15.099.	Pengadaan Media Pembelajaran SMK Kota pekanbaru	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	108 Set	1,502,200,000.00
		01.15.100.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Kota Pekanbaru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	-	3 Ruang	0
		01.15.101.	Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	Jumlah Sekolah SMA Yang Mendapat Bantuan DAK	-	195 Sekolah	31,040,483,000.00
		01.15.102.	Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	Jumlah Sekolah SMK Yang Mendapat Bantuan DAK	-	46 Sekolah	99,644,469,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**1.1.01.16.**	**PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS**	**Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan**	88,08 Persen	88,62 Persen	**181,315,372,782.00**
		01.16.001.	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	1	200 Siswa	602,340,000.00
		01.16.002.	Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	Jenis Lomba Yang Diikuti	860	44 Cabang Lomba	2,677,677,000.00
		01.16.003.	Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis	Jumlah Siswa Pusat Layanan Autis	2	46 Siswa	2,177,458,100.00
		01.16.004.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah Pekanbaru	Jumlah Sekolah PKPLK yang di Rehabilitasi	-	3 Sekolah	417,122,100.00
		01.16.005.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah I	Jumlah sekolah PKPLK Wilayah I yang di Rehabilitasi	-	1 Sekolah	138,551,194.00
		01.16.006.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah II	Jumlah Sekolah PKPLK WILAYAH II yang di Rehabilitasi	-	3 Sekolah	714,800,200.00
		01.16.007.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah III	Jumlah Sekolah PKPLK wilayah III yang di Rehabilitasi	-	1 Sekolah	135,355,600.00
		01.16.008.	Rehabilitasi PKPLK Wilayah IV	Jumlah Sekolah PKPLK wilayah IV yang di Rehabilitasi	-	1 Sekolah	139,288,400.00
		01.16.010.	RKB PKPLK Wilayah I	Sekolah yang mendapat RKB	-	1 Sekolah	731,520,900.00
		01.16.014.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah Pekanbaru	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	194,852,200.00
		01.16.015.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah I	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	195,846,100.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.16.016.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah II	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	195,631,900.00
		01.16.017.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah III	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	194,969,500.00
		01.16.018.	Pengadaan Media Pembelajaran PKPLK Wilayah IV	Jenis media pembelajaran yang di penuhi	-	2 Sekolah	194,989,900.00
		01.16.019.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah Pekanbaru	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK yang dipenuhi	-	2 Ruang	195,349,900.00
		01.16.020.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah I	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK wilayah I yang di penuhi	-	2 Ruang	196,189,900.00
		01.16.021.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah II	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK wilayah II yang di penuhi	-	2 Ruang	198,010,100.00
		01.16.022.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah III	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK wilayah III yang di penuhi	-	1 Ruang	0
		01.16.023.	Pengadaan Mebeuler PKPLK Wilayah IV	Jenis Meubeler Sekolah PKPLK WILAYAH IV yang di penuhi	-	1 Ruang	95,949,897.00
		01.16.024.	Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Jumlah Siswa SMA olahraga Provinsi Riau	300	300 Siswa	8,000,000,000.00
		01.16.025.	Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	Jumlah siswa yang mengikuti Festival inovasi dan kreatifitas PKPLK	1	150 Siswa	844,707,700.00
		01.16.026.	Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	Jumlah Siswa sekolah Terbuka pendidikan jarak jauh	-	200 Siswa	750,000,000.00
		01.16.027.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLBN Pembina Wilayah Pekanbaru	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama Pekanbaru	-	30 Siswa	670,000,000.00
		01.16.028.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah I	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	40 Siswa	904,774,850.00
		01.16.029.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah II	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	70 Siswa	1,448,597,900.00
		01.16.030.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah III	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	68 Siswa	1,318,090,000.00
		01.16.031.	Penyelenggaraan Penunjang Layanan Asrama SLB Wilayah IV	Jumlah Siswa SLB yang tinggal diasrama	-	49 Siswa	966,538,500.00
		01.16.032.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Marginal	Jumlah Guru Marginal	-	251 Orang	6,292,467,500.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.16.033.	Pendampingan Kegiatan ADEM dan ADIK bagi daerah 3T dan KAT	Jumlah siswa yg mendapatkan Program ADEM 3T dan ADIK dan KAT	-	75 Siswa	384,061,000.00
		01.16.034.	Apresiasi GTK PAUD dan Gebyar Paud DIKMAS	JUMLAH GTK PAUD YANG BERPRESTASI	-	228 Orang	1,523,720,350.00
		01.16.035.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Penyelenggaran PKPLK	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI , SINKRONISASI DAN MONITORING PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PKPLK DI 12 KAB/KOTA		1 Dokumen	350,000,000.00
		01.16.036.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah I	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	690,794,500.00
		01.16.037.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah II	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	579,089,600.00
		01.16.038.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah III	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	188,672,800.00
		01.16.039.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Wilayah IV	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	283,440,000.00
		01.16.040.	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung PKPLK Kota Pekanbaru	Jenis infrastruktur Pendukung yang di Bangun	-	1 Sekolah	196,064,191.00
		01.16.041.	Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan bantuan DAK	-	10 Sekolah	146,528,451,000.00
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	**1.1.01.17.**	**PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**	**Menurunnya angka putus sekolah**	0.71 Persen	0.54 Persen	**686,722,570,000.00**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.17.001.	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang mendapat DAK Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	-	455 Sekolah	208,196,772,000.00
		01.17.002.	Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	Jumlah siswa mendapat bantuan BOS daerah dan guru yang mendapat Honor dan Gaji	220,609	518894 Orang	444,087,970,000.00
		01.17.003.	Penyelenggaraan Bos Kinerja	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan DAK Kinerja	-	38 Sekolas	24,493,828,000.00
		01.17.004.	Penyelenggaraan Bos Afirmasi	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan DAK Afirmasi	-	118 Sekolah	9,944,000,000.00
	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	**1.1.01.18.**	**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat pendidikan > D4/S1**	753 Orang;	162 Orang;	**139,748,881,500.00**
				Jumlah siswa miskin yang dibantu	0 Siswa;	1700 Siswa;	
				Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa	2724 Siswa;	3635 Siswa;	
		01.18.001.	MGMP Guru Mata Pelajaran Program Pendidikan Menengah	Jumlah guru SMA/SMK yang mengikuti MGMP	-	320 Orang	1,300,000,000.00
		01.18.002.	Pendidikan Alih Profesi Guru Adaptif menjadi Guru Produktif	Jumlah Guru Adaptif menjadi Guru Produktif	-	30 Orang	1,000,000,000.00
		01.18.003.	Diklat Muatan Lokal Bagi Guru SMA/SMK se Provinsi Riau	Jumlah Guru Yang Mengikuti Diklat Muatan Lokal	-	415 Orang	700,000,000.00
		01.18.004.	Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi RIau	Jumlah Guru yang mengikuti Olimpiade Guru Nasional (OGN)	75	60 Orang	188,260,600.00
		01.18.005.	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi Riau	Jumlah Siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasinal (O2SN) SD, SMP, SMA DAN SMK	-	708 Orang	5,744,250,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.18.006.	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	Jumlah Siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP, SMA dan SMK	-	624 Orang	7,000,000,000.00
		01.18.007.	Penyenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD, SMP DAN SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD, SMP, dan SMA	-	588 Orang	4,270,068,400.00
		01.18.008.	Pemberian Beasiswa pada Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Provinsi Riau	Perguruan Tinggi dalam Provinsi; Perguruan Tinggi Nasional;	-	3310 Orang	57,583,627,000.00
						102 Orang	
		01.18.009.	Pengelolaan Data Pendidikan	Jumlah dokumen data pendidikan	12	1 Dokumen	1,383,611,400.00
		01.18.010.	Peningkatan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan agenda kerja Pendidikan	1	13 Orang	1,172,389,000.00
		01.18.011.	Festival Literasi Siswa (FLS) SD, SMP, SMA DAN SMK	Jumlah siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Festival Literasi Siswa (FLS) SD, SMP, SMA dan SMK	-	12 Kabupaten/Kota	2,194,200,000.00
		01.18.012.	Sinkronisasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG) dan Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)	Jumlah permasalahan terkait data guru dan tunjangan didaerah jenjang SMA. SMK dan SLB	-	12 Bulan	450,000,000.00
		01.18.013.	Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan SMA, SMK dan SLB	Jumlah guru yang mengikuti Pendidikan Profesi (PPG) dalam jabatan SMA, SMK dan SLB	-	165 Orang	1,800,000,000.00
		01.18.014.	Diklat Calon Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK dan SLB	Jumlah Calon Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Menengah SMA, SMK dan SLB yang mengikuti Diklat	-	84 Orang	1,410,016,000.00
		01.18.015.	Diklat Calon Pengawas dan Penguatan Pengawas Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Calon Pengawas Yang Mengikuti Diklat dan Mendapatkan Sertifikat Pengawas Sekolah	-	30 Orang	500,000,000.00
		01.18.016.	Peningkatan Kompetensi Pendidik PNS dan GTT SMA, SMK dan SLB	Jumlah Pendidik PNS dan GTT SMA, SMK dan SLB yang kompetensinya meningkat	-	815 Orang	8,100,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		01.18.017.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	Jumlah Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB yang kompetensinya meningkat	-	1644 Orang	6,099,006,400.00
		01.18.018.	Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pengawas SMA, SMK dan SLB	Jumlah Pengawas SMA, SMK dan SLB serta Peningkatan Mutu Kinerja Pengawas	-	40 Orang	200,000,000.00
		01.18.019.	Pembinaan Sekolah Unggulan Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Unggulan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pembinaan	-	24 Sekolah	2,000,000,000.00
		01.18.021.	PPDB On Line SMA/SMK	Jumlah Sekolah yang mengikuti PPDB Online	-	140 Sekolah	585,698,000.00
		01.18.022.	Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Jumlah Siswa di Kabupaten/Kota yang mengikuti Ujian Nasional SMA/MA/SMK	12	8900 Siswa	1,173,356,000.00
		01.18.023.	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau"	Jumlah siswa, tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima penghargaan	-	175 Orang	750,000,000.00
		01.18.024.	Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK	Jumlah Penghargaan Yang Diperoleh	-	496 Penghargaan	2,000,000,000.00
		01.18.026.	Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik	Jumlah Guru Yang Menerima Beasiswa	-	162 Orang	6,078,068,700.00
		01.18.027.	Pemberian Beasiswa Bidik Misi	Jumlah mahasiswa ekonomi kurang mampu yang mendapatkan beasiswa bidik misi	-	2400 Orang	26,066,330,000.00
				TOTAL			**1,335,714,400,534.00**

Tabel 6.1.b

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	**Meningkatnya Akses Pendidikan**	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**	**77.81** **23,98** **85,84**	**188,593,214,538.00**	**79.90** **24,00** **86,38**	**168,685,366,678.00**	**80.03** **24,02** **86,88**	**104,820,195,336.73**	**80.10** **24,04** **87,38**	**59,138,383,252.00**	**80.10** **24,04** **87,38**	**521,237,159,804.73**	Dinas pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**86.70**	**89.27**	**127,135,322,190.00**	**91.87**	**104,198,504,778.00**	**94.47**	**59,474,588,572.00**	**97.07**	**35,499,999,000.00**	**97.07**	**326,308,414,540.00**	Dinas pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	11 Unit	1 Unit	2,632,786,155.00	1 Unit	3,450,000,000.00	4 Unit	21,000,000,000.00	4 Unit	14,000,000,000.00	10 Unit	41,082,786,155.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	367 ruang	144 ruang	39,278,477,165.00	59 ruang	34,388,483,062.00	22 ruang	7,700,000,000.00	8 ruang	2,800,000,000.00	233 Ruang	84,166,960,227.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	30 ruang	39 ruang	10,818,072,110.00	3 ruang	2,362,077,770.00	2 ruang	1,050,000,000.00	2 ruang	1,050,000,000.00	46 ruang	15,280,149,880.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	19 ruang	22 ruang	9,363,259,740.00	2 ruang	3,737,191,624.00	1 ruang	450,000,000.00	1 ruang	400,000,000.00	26 ruang	13,950,451,364.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	37 ruang	22 ruang	9,759,516,115.00	2 ruang	4,194,226,947.00	1 ruang	450,000,000.00	1 ruang	400,000,000.00	26 ruang	14,803,743,062.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	24 ruang	15 ruang	6,597,016,210.00	11 ruang	4,405,065,067.00	1 ruang	450,000,000.00	1 ruang	400,000,000.00	28 ruang	11,852,081,277.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	24 ruang	16 ruang	4,037,860,140.00	2 ruang	980,248,054.00	1 ruang	450,000,000.00	1 ruang	400,000,000.00	20 ruang	5,868,108,194.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	27 ruang	6 ruang	1,594,747,340.00			1 ruang	450,000,000.00	1 ruang	350,000,000.00	8 ruang	2,394,747,340.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	- ruang	20 ruang	5,504,611,765.00	11 ruang	3,031,846,624.00	1 ruang	350,000,000.00	1 ruang	350,000,000.00	33 ruang	9,236,458,389.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	18 ruang	9 ruang	3,052,072,471.00	1 ruang	449,999,699.00	1 ruang	500,000,000.00	1 ruang	449,999,000.00	12 ruang	4,452,071,170.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 ruang					2 ruang	1,600,000,000.00	2 ruang	1,600,000,000.00	4 ruang	3,200,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit					1 Unit	1,500,000,000.00	1 Unit	1,500,000,000.00	2 Unit	3,000,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 unit	20 unit	5,488,870,599.00	34 unit	18,735,695,760.00	8 unit	1,600,000,000.00	2 unit	500,000,000.00	64 unit	26,324,566,359.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 unit			5 unit	1,470,603,624.00	1 unit	1,200,000,000.00	1 unit	300,000,000.00	7 unit	2,970,603,624.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 ruang	28 ruang	6,211,666,960.00	55 ruang	11,420,752,659.00	11 ruang	2,250,000,000.00	10 ruang	2,000,000,000.00	104 ruang	21,882,419,619.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 ruang					3 ruang	450,000,000.00	3 ruang	450,000,000.00	6 ruang	900,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 ruang					3 ruang	450,000,000.00	3 ruang	450,000,000.00	6 ruang	900,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 ruang					3 ruang	450,000,000.00	3 ruang	450,000,000.00	6 ruang	900,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 ruang					3 ruang	450,000,000.00	3 ruang	450,000,000.00	6 ruang	900,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 ruang					3 ruang	450,000,000.00	3 ruang	450,000,000.00	6 ruang	900,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 ruang					3 ruang	450,000,000.00	3 ruang	450,000,000.00	6 ruang	900,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang					2 ruang	300,000,000.00			2 ruang	300,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit					2 ruang	500,000,000.00	2 ruang	500,000,000.00	4 ruang	1,000,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Unit					3 Unit	4,000,000,000.00	2 Unit	1,500,000,000.00	5 Unit	5,500,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 unit					10 unit	750,000,000.00	3 unit	450,000,000.00	13 unit	1,200,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	4 unit					2 unit	300,000,000.00	2 unit	300,000,000.00	4 unit	600,000,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	367 Paket	217 Paket	21,166,041,791.00	57 Paket	11,975,275,984.00	20 Paket	5,700,000,000.00	5 Paket	450,000,000.00	299 Paket	39,291,317,775.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60 Peserta Didik	183 Peserta Didik	898,500,000.00	300 Peserta Didik	990,000,000.00	122 Peserta Didik	605,000,000.00	120 Peserta Didik	600,000,000.00	725 Peserta Didik	3,093,500,000.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1. 100 Sekolah 2. 456 Sekolah 3. 456 Sekolah 4. 456 Sekolah	459 Satuan Pendidikan	731,823,629.00	460 Satuan Pendidikan	2,607,037,904.00	461 Satuan Pendidikan	3,619,588,572.00	465 Satuan Pendidikan	2,500,000,000.00	465 Satuan Pendidikan	9,458,450,105.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B**	**82.10**	**84.58**	**58,680,419,835.00**	**85.56**	**56,404,926,900.00**	**86.54**	**40,157,021,900.00**	**87.52**	**19,116,608,252.00**	**87.52**	**174,358,976,887.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit				-	2 Unit	18,332,000,000.00	1 Unit	5,000,000,000.00	3 Unit	23,332,000,000.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	28 Ruang	12 Ruang	3,261,412,263.00	22 Ruang	16,632,659,645.00	30 Ruang	10,078,200,000.00	10 Ruang	5,000,000,000.00	74 Ruang	34,972,271,908.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	ruang	20 ruang	26,370,832,878.00	10 ruang	12,001,030,860.00	1 ruang	1,300,000,000.00	1 ruang	1,300,000,000.00	32 ruang	40,971,863,738.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	ruang	35 ruang	14,464,636,460.00	14 ruang	6,211,916,500.00	1 ruang	400,000,000.00	1 ruang	400,000,000.00	51 ruang	21,476,552,960.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	6 ruang	1,000,236,828.00	3 ruang	958,436,500.00					9 ruang	1,958,673,328.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	8 ruang	3,242,563,395.00	5 ruang	2,191,857,500.00	1 ruang	340,000,000.00	1 ruang	340,000,000.00	15 ruang	6,114,420,895.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit				-			1 Unit	1,598,608,252.00	1 Unit	1,598,608,252.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	230 unit	13 unit	3,383,799,092.00	10 unit	6,052,238,127.00	1 unit	200,000,000.00	1 unit	200,000,000.00	25 unit	9,836,037,219.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	5 ruang	794,069,954.00	3 Ruang	439,999,997.00	10 Ruang	3,012,821,900.00	10 Ruang	2,000,000,000.00	28 Ruang	6,246,891,851.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit					1 unit	200,000,000.00	1 unit	200,000,000.00	2unit	400,000,000.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit					1 unit	200,000,000.00	1 unit	200,000,000.00	2 unit	400,000,000.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	40 Paket	41 Paket	6,091,778,173.00	17 Paket	9,757,259,827.00	30 Paket	2,550,000,000.00	30 Paket	2,550,000,000.00	118 Paket	20,949,038,000.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1. 307 SMK 2. 21 SMK PK 3. 0 SMK BLUD 4. 0 SMK Unggul 5. 209 SMK 6. 21 SMK TEFA 7. 17 SMK LSP-P1	307 Satuan Pendidikan	71,090,792.00	307 Satuan Pendidikan	2,159,527,944.00	307 Satuan Pendidikan	3,544,000,000.00	309 Satuan Pendidikan	328,000,000.00	310 Satuan Pendidikan	6,102,618,736.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Persentase Sekolah Pendidikan Khusus yang terakreditasi minimal B**	**72.34**	**72.34**	**2,777,472,513.00**	**72.34**	**8,081,935,000.00**	**72.34**	**5,188,584,864.73**	**72.34**	**4,521,776,000.00**	**72.34**	**20,569,768,377.73**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	20 ruang			6 ruang	2,584,406,579.00	5 Ruang	1,214,720,000.00	4 Ruang	971,776,000.00	15 Ruang	4,770,902,579.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang			1 ruang	312,246,201.00					1 ruang	312,246,201.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang			1 ruang	450,003,493.00					1 ruang	450,003,493.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang			1 ruang	293,059,297.00					1 ruang	293,059,297.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit							3 Unit	1,200,000,000.00	3 Unit	1,200,000,000.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	47 Unit	1 unit	415,853,918.00	1 unit	609,345,567.00	3 Unit	750,000,000.00	2 Unit	500,000,000.00	7 Unit	2,275,199,485.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	unit			8 unit	1,734,301,904.00					8 unit	1,734,301,904.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	unit					1 unit	200,000,000.00	1 Unit	200,000,000.00	2 unit	400,000,000.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	ruang			1 ruang	356,360,811.00					1 ruang	356,360,811.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	ruang			1 ruang	187,389,331.00					1 ruang	187,389,331.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	ruang			1 ruang	538,487,167.00					1 ruang	538,487,167.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	28 ruang	2 ruang	454,162,605.00			3 Ruang	750,000,000.00	2 Ruang	350,000,000.00	7 Ruang	1,554,162,605.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.19	Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	ruang	1 ruang	104,255,125.00			1 ruang	200,000,000.00			2 ruang	304,255,125.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	ruang	1 ruang	134,281,025.00			1 ruang	200,000,000.00			2 ruang	334,281,025.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit					3 Unit	673,864,864.73	1 Unit	300,000,000.00	4 Unit	973,864,864.73	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 unit	6 unit	555,758,983.00			2 unit	500,000,000.00	1 unit	250,000,000.00	9 unit	1,305,758,983.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	ruang	1 ruang	486,003,036.00							1 ruang	486,003,036.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	5 Paket	579,758,051.00	9 Paket	984,914,650.00	4 Paket	600,000,000.00	4 Paket	600,000,000.00	22 Paket	2,764,672,701.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	47,399,770.00	47 Satuan Pendidikan	31,420,000.00	47 Satuan Pendidikan	100,000,000.00	47 Satuan Pendidikan	150,000,000.00	47 Satuan Pendidikan	328,819,770.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
	Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan	**1.01.02**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**	**77.81** **23,98** **85,84**	**1,062,199,654,792.00**	**79.90** **24,00** **86,38**	**1,088,126,709,076.00**	**80.03** **24,02** **86,88**	**1,142,982,056,304.27**	**80.10** **24,04** **87,38**	**1,126,550,780,110.00**	**80.10** **24,04** **87,38**	**4,419,859,200,282.27**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**86.70**	**89.27**	**676,284,815,305.00**	**91.87**	**649,574,592,984.00**	**94.47**	**745,358,881,737.67**	**97.07**	**735,070,709,798.40**	**97.07**	**2,806,288,999,825.07**	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	48 paket	3,149,806,582.00			10 Paket	500,000,000.00	10 Paket	500,000,000.00	68 Paket	4,149,806,582.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	- Paket	48 Paket	9,058,951,930.00	24 Paket	4,795,113,328.00	30 Paket	150,000,000.00	20 paket	100,000,000.00	122 paket	14,104,065,258.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1. 450 Siswa 2. 225 Siswa 3. 22.800 Siswa	459 Satuan Pendidikan	8,988,893,157.00	460 Satuan Pendidikan	12,443,913,323.00	461 Satuan Pendidikan	12,520,422,980.00	465 Satuan Pendidikan	12,520,422,980.00	465 Satuan Pendidikan	46,473,652,440.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1. 16 Cabang 2. 8 Cabang 3. 9 Cabang 4. 3 Cabang	337 Peserta Didik	3,016,591,402.00	1164 Peserta Didik	7,661,499,310.00	1164 Peserta Didik	10,404,650,200.00	1164 Peserta Didik	10,404,650,200.00	3829 Peserta Didik	31,487,391,112.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 50 Pustakawan 2. 40 Laboran 3. 100 tenaga pendidik 4. 75 Guru 5. 446 Kepala Sekolah 6. 120 orang Guru Penggerak 7. 50 orang Pendamping Praktik 8. 50 guru BK 9. 55 guru Ekonomi 10. 70 guru matematika 11. 70 guru fisika 12. 108 Guru yang mengikuti OGN 13. 55 guru bahasa inggris	3003 Orang	5,159,721,631.00	4837 Orang	8,349,292,432.00	4837 Orang	15,907,105,678.00	4837 Orang	7,000,000,000.00	17514 Orang	36,416,119,741.00	Bidang Pembinaan SMA	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	446 Satuan Pendidikan	446 Satuan Pendidikan	314,520,994,749.00	447 Satuan Pendidikan	259,277,008,000.00	450 Satuan Pendidikan	285,900,550,290.00	450 Satuan Pendidikan	285,900,550,290.00	450 Satuan Pendidikan	1,145,599,103,329.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	446 Orang	456 Orang	332,389,855,854.00	457 Orang	357,047,766,591.00	461 Orang	419,976,152,589.67	461 Orang	418,645,086,328.40	1835 Orang	1,528,058,861,363.07	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Keiuruan**	**Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B**	**82.10**	**84.58**	**349,795,255,326.00**	**85.56**	**375,794,223,265.00**	**86.54**	**333,308,446,935.60**	**87.52**	**325,906,468,835.60**	**87.52**	**1,384,804,394,362.20**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- unit	3 unit	999,996.00							3 unit	999,996.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	- unit	42 Paket	65,948,182,987.00	20 Paket	38,338,122,000.00	1 Paket	3,000,000,000.00	1 Paket	750,000,000.00	64 Paket	108,036,304,987.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	- Paket	8 Paket	2,315,209,833.00							8 paket	2,315,209,833.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1. 420 siswa 2. 165 siswa 3. 12158 siswa 4. 31670 siswa 5. 13508 siswa	307 Satuan Pendidikan	8,044,365,397.00	307 Satuan Pendidikan	16,334,529,358.00	307 Satuan Pendidikan	17,009,764,525.60	309 Satuan Pendidikan	17,009,764,525.60	310 Satuan Pendidikan	58,398,423,806.20	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1. 12 Cabang Lomba 2. 6 Cabang Lomba 3. 10 Cabang Lomba	62 peserta didik	731,930,933.00	336 peserta didik	3,406,674,907.00	336 peserta didik	3,987,786,907.00	336 peserta didik	3,987,786,907.00	1070 peserta didik	12,114,179,654.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 459 pendidik yang sudah mengikuti diklat asessor. 2. 98 Pendidik 3. 210 Pendidik	96 Orang	910,644,746.00	2017 Orang	2,347,194,000.00	2017 Orang	6,800,000,000.00	2017 Orang	3,942,000,000.00	6147 Orang	13,999,838,746.00	Bidang Pembinaan SMK	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	155,252,121,434.00	298 Satuan Pendidikan	176,393,503,000.00	298 Satuan Pendidikan	149,374,635,503.00	300 Satuan Pendidikan	149,374,635,503.00	300 Satuan Pendidikan	630,394,895,440.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	298 Orang	308 Orang	116,591,800,000.00	309 Orang	138,974,200,000.00	313 Orang	153,136,260,000.00	314 Orang	150,842,281,900.00	1.244 Orang	559,544,541,900.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**34 sekolah**	**72.34**	**36,119,584,161.00**	**72.34**	**62,757,892,827.00**	**72.34**	**64,314,727,631.00**	**72.34**	**65,573,601,476.00**	**72.34**	**228,765,806,095.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	456 Paket	4 paket	19,999,864.00			4 Paket	400,000,000.00	4 Paket	400,000,000.00	12 Paket	819,999,864.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	- paket	4 paket	909,584,712.00	36 paket	4,592,615,000.00					40 paket	5,502,199,712.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1. 330 Siswa 2. 140 Siswa 3. 50 Siswa 4. 40 Siswa 5. 1024 Siswa 6. 140 Siswa	47 Satuan Pendidikan	12,782,408,381.00	47 Satuan Pendidikan	18,458,151,037.00	47 Satuan Pendidikan	20,307,000,000.00	47 Satuan Pendidikan	20,307,000,000.00	47 Satuan Pendidikan	71,854,559,418.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1. 130 siswa 2. 128 siswa 3. 128 siswa 4. 85 siswa	406 Peserta Didik	3,051,944,655.00	406 Peserta Didik	2,324,058,505.00	640 Peserta Didik	2,751,126,155.00	695 Peserta Didik	2,810,000,000.00	2147 Peserta Didik	10,937,129,315.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 58 orang 2. 120 orang 3. 251 orang 4. 251 orang	158 Orang	6,717,411,699.00	158 Orang	6,599,619,285.00	158 Orang	7,000,000,000.00	158 Orang	6,500,000,000.00	632 Orang	26,817,030,984.00	Bidang Pembinaan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	7,786,434,850.00	47 Satuan Pendidikan	14,069,649,000.00	47 Satuan Pendidikan	14,375,861,476.00	47 Satuan Pendidikan	14,375,861,476.00	47 Satuan Pendidikan	50,607,806,802.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	47 Orang	57 Orang	4,851,800,000.00	58 Orang	16,713,800,000.00	61 Orang	19,480,740,000.00	61 Orang	21,180,740,000.00	237 Orang	62,227,080,000.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		1.01.03	**Program Pengembangan kurikulum**	**Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal**	**70.00**	**75.00**	**492,784,460.00**	**80.00**	**641,033,900.00**	**85.00**	**1,025,000,000.00**	**90.00**	**2,076,015,132.00**	**90.00**	**4,234,833,492.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan pada satuan pendidikan menengah**	1 kurikulum	**1 kurikulum**	**492,784,460.00**	**1 Kurikulum**	**641,033,900.00**	**1 Kurikulum**	**1,025,000,000.00**	**1 Kurikulum**	**2,076,015,132.00**	**1 Kurikulum**	**4,234,833,492.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	-	420 Orang	492,784,460.00	763 Orang	641,033,900.00	763 Orang	1,025,000,000.00	763 Orang	2,076,015,132.00	2709 Orang	4,234,833,492.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus**	**58.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65.00**	**450,000,000.00**	**70.00**	**800,000,000.00**	**70.00**	**1,250,000,000.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.04.1.01	**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**Jumlah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terpenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan**	47 sekolah					75 sekolah	**450,000,000.00**	80 sekolah	**800,000,000.00**	155 sekolah	**1,250,000,000.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen					1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	2 Dokumen	600,000,000.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan					1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	500,000,000.00	2 Laporan	650,000,000.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang mengajukan perizinan terlayani**	**88.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**418,214,444.00**	**100.00**	**1,500,000,000.00**	**100.00**	**868,214,444.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05.1.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat**						**40 Dokumen**	**268,214,444.00**	**40 Dokumen**	**600,000,000.00**	**80 Dokumen**	**868,214,444.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-					20 Dokumen	100,000,000.00	20 Dokumen	300,000,000.00	40 Dokumen	400,000,000.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05.1.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-					20 Dokumen	168,214,444.00	20 Dokumen	300,000,000.00	40 Dokumen	468,214,444.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05.1.02	**Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat**						**10 Dokumen**	**150,000,000.00**	**10 Dokumen**	**900,000,000.00**	**20 Dokumen**	**1,050,000,000.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen					5 Dokumen	50,000,000.00	5 Dokumen	300,000,000.00	10 Dokuemn	350,000,000.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.05.1.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen					5 Dokumen	100,000,000.00	5 Dokumen	600,000,000.00	10 Dokuemn	700,000,000.00	Bidang GTK Kurikulum dan Perizinan	12 Kabupaten/Kota
		1.01.01.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang pendidikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,043,936,791,411.00**	**100 Persen**	**1,087,544,847,412.00**	**100 Persen**	**1,130,856,006,515.00**	**100 Persen**	**1,170,179,976,694.00**	**100 Persen**	**4,432,517,622,032.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**2,520,670,288.00**	**7 Dokumen**	**5,457,299,128.00**	**12 Dokumen**	**5,323,000,000.00**	**12 Dokumen**	**6,330,000,000.00**	**38 Dokumen**	**19,630,969,416.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7 dokumen	1,747,046,236.00	2 Dokumen	3,964,628,388.00	3 Dokumen	3,388,000,000.00	3 Dokumen	3,730,000,000.00	15 Dokumen	12,829,674,624.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7 laporan	773,624,052.00	4 Laporan	1,492,670,740.00	5 Laporan	1,935,000,000.00	5 Laporan	2,600,000,000.00	21 Laporan	6,801,294,792.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,024,692,609,191.00**	**100 Persen**	**1,067,442,839,971.00**	**100 Persen**	**1,107,435,706,515.00**	**100 Persen**	**1,141,539,976,694.00**	**100 Persen**	**4,341,111,132,371.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7996 orang	7996 orang/ Bulan	1,024,246,609,191.00	7996 orang/ Bulan	1,067,442,839,971.00	8196 orang/ Bulan	1,107,435,706,515.00	8400 orang/ Bulan	1,141,539,976,694.00	32588 orang/Bulan	4,340,665,132,371.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 organisasi	1 dokumen	446,000,000.00							1 dokumen	446,000,000.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**561,190,000.00**	**100 Persen**	**351,730,000.00**	**100 Persen**	**385,000,000.00**	**100 Persen**	**500,000,000.00**	**100 Persen**	**1,797,920,000.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 laporan	561,190,000	1 Laporan	351,730,000.00	1 Laporan	385,000,000.00	1 Laporan	500,000,000.00	4 Laporan	1,797,920,000.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**6,154,138,049.00**	**1 Dokumen**	**3,186,911,187.00**	**1 Dokumen**	**5,886,800,000.00**	**1 Dokumen**	**7,350,000,000.00**	**4 Dokumen**	**22,577,849,236.00**	Dinas Pendidikan	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Jenis	9 Paket	89,998,552.00	9 Paket	99,986,927.00	9 Paket	110,000,000.00	9 Paket	200,000,000.00	36 Paket	499,985,479.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54 Unit	24 Paket	4,377,163,952.00	54 Paket	1,020,967,760.00	54 Paket	1,230,000,000.00	54 Paket	2,000,000,000.00	186 Paket	8,628,131,712.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1887 Porsi	943 Paket	210,000,000.00	1887 Paket	299,994,000.00	2080 Paket	592,000,000.00	2290 Paket	700,000,000.00	7200 Paket	1,801,994,000.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Jenis	17 Paket	390,627,545.00	17 Paket	352,439,500.00	17 Paket	676,000,000.00	17 Paket	750,000,000.00	68 Paket	2,169,067,045.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418 Kali	200 Laporan	1,086,348,000.00	418 Laporan	1,413,523,000.00	460 Laporan	3,278,800,000.00	510 Laporan	3,700,000,000.00	1588 Laporan	9,478,671,000.00	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		X.XX.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Disediakan**	**24 Unit**	**24 Unit**	**668,115,895.00**	**24 Unit**	**668,990,723.00**	**26 Unit**	**440,000,000.00**	**29 Unit**	**1,500,000,000.00**	**103 Unit**	**3,277,106,618.00**	Dinas Pendidikan	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	57 unit	668,115,895.00	24 Unit	668,990,723.00	26 Unit	440,000,000.00	29 Unit	1,500,000,000.00	136 Unit	3,277,106,618.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**404 Orang**	**404 Orang**	**7,484,989,182.00**	**404 Orang**	**7,354,656,679.00**	**404 Orang**	**8,448,500,000.00**	**404 Orang**	**9,360,000,000.00**	**1616 Orang**	**32,648,145,861.00**	Dinas Pendidikan	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Surat	12 Laporan	24,200,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	55,000,000.00	12 Laporan	60,000,000.00	48 Laporan	189,200,000.00	Sekretariat	12 Kabupaten/Kota
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Rekening	12 Laporan	2,049,002,800.00	12 Laporan	1,899,998,224.00	12 Laporan	2,210,000,000.00	12 Laporan	2,500,000,000.00	48 Laporan	8,659,001,024.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	220 Orang	12 Laporan	5,411,786,382.00	12 Laporan	5,404,658,455.00	12 Laporan	6,183,500,000.00	12 Laporan	6,800,000,000.00	48 Laporan	23,799,944,837.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,855,078,806.00**	**100 Persen**	**3,082,419,724.00**	**100 Persen**	**2,937,000,000.00**	**100 Persen**	**3,600,000,000.00**	**100 Persen**	**11,474,498,530.00**	Dinas Pendidikan	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	289,860,000.00	17 Unit	549,810,000.00	17 Unit	605,000,000.00	17 Unit	700,000,000.00	68 Unit	2,144,670,000.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	8 Unit	160,402,600.00	17 Unit	299,485,000.00	17 Unit	482,000,000.00	17 Unit	600,000,000.00	59 Unit	1,541,887,600.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	179,870,000.00	45 Unit	199,980,000.00	45 Unit	220,000,000.00	45 Unit	300,000,000.00	180 Unit	899,850,000.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	15 Unit	1,224,946,206.00	15 Unit	2,033,144,724.00	15 Unit	1,630,000,000.00	15 Unit	2,000,000,000.00	60 Unit	6,888,090,930.00	Sekretariat	Kota Pekanbaru
		1.01.01.1.01.0001	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**				**540,732,979.00**		**599,991,001.00**		**2,600,000,000.00**		**2,710,000,000.00**		**2,450,723,980.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.01.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang pendidikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**540,732,979.00**	**100 Persen**	**599,991,001.00**	**100 Persen**	**600,000,000.00**	**100 Persen**	**710,000,000.00**	**100 Persen**	**2,450,723,980.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**288,472,351.00**	**1 Dokumen**	**297,997,901.00**	**1 Dokumen**	**298,000,000.00**	**1 Dokumen**	**330,000,000.00**	**4 Dokumen**	**1,214,470,252.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Jenis	50 Paket	78,498,513.00	50 Paket	59,997,901.00	50 Paket	60,000,000.00	50 Paket	70,000,000.00	200 Paket	268,496,414.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	960 Porsi	960 Paket	36,800,000.00	960 Paket	38,000,000.00	960 Paket	38,000,000.00	960 Paket	40,000,000.00	3840 Paket	152,800,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	10 Paket	13,783,838.00	10 Paket	15,000,000.00	10 Paket	15,000,000.00	10 Paket	20,000,000.00	40 Paket	63,783,838.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	100 Laporan	159,390,000.00	100 Laporan	185,000,000.00	100 Laporan	185,000,000.00	100 Laporan	200,000,000.00	400 Laporan	729,390,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**14 Orang**	**14 Orang**	**166,200,628.00**	**14 Orang**	**213,995,600.00**	**14 Orang**	**214,000,000.00**	**14 Orang**	**240,000,000.00**	**56 Orang**	**834,196,228.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Rekening	12 Laporan	27,000,628.00	12 Laporan	29,995,600.00	12 Laporan	30,000,000.00	12 Laporan	40,000,000.00	48 Laporan	126,996,228.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Orang	12 Laporan	139,200,000.00	12 Laporan	184,000,000.00	12 Laporan	184,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	48 Laporan	707,200,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**100 Persen**	**100 Persen**	**86,060,000.00**	**100 Persen**	**87,997,500.00**	**100 Persen**	**88,000,000.00**	**100 Persen**	**140,000,000.00**	**100 Persen**	**402,057,500.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	36,060,000.00	1 Unit	37,997,500.00	1 Unit	38,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	4 Unit	152,057,500.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Ruang	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**	**2,000,000,000.00**	**80,10** **24,04** **87,38`**	**2,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**86.70**					**94.47**	**1,000,000,000.00**	**97.07**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 50 Pustakawan 2. 40 Laboran 3. 100 tenaga pendidik 4. 75 Guru 5. 446 Kepala Sekolah 6. 120 orang Guru Penggerak 7. 50 orang Pendamping Praktik 8. 50 guru BK 9. 55 guru Ekonomi 10. 70 guru matematika 11. 70 guru fisika 12. 108 Guru yang mengikuti OGN 13. 55 guru bahasa inggris					480 orang	500,000,000.00	480 orang	500,000,000.00	960 orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**		**80,10** **24,04** **87,38`**				Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B**	**82.10**					**86.54**	**1,000,000,000.00**	**87.52**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 459 pendidik yang sudah mengikuti diklat asessor. 2. 98 Pendidik 3. 210 Pendidik					480 orang	500,000,000.00	480 orang	500,000,000.00	960 orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah I	Kabupaten Siak; Pelalawan; Kepulauan Meranti
		1.01.01.1.01.0002	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II**				**536,799,303.00**		**599,984,351.00**		**2,600,000,000.00**		**2,710,000,000.00**		**2,446,783,654.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.01.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang pendidikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**536,799,303.00**	**100 Persen**	**599,984,351.00**	**100 Persen**	**600,000,000.00**	**100 Persen**	**710,000,000.00**	**100 Persen**	**2,446,783,654.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**309,520,481.00**	**1 Dokumen**	**342,015,155.00**	**1 Dokumen**	**298,000,000.00**	**1 Dokumen**	**330,000,000.00**	**4 Dokumen**	**1,279,535,636.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Jenis	50 Paket	56,263,965.00	50 Paket	59,128,467.00	50 Paket	60,000,000.00	50 Paket	70,000,000.00	200 Paket	245,392,432.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	960 Porsi	960 Paket	18,400,000.00	960 Paket	22,724,000.00	960 Paket	38,000,000.00	960 Paket	40,000,000.00	3840 Paket	119,124,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	10 Paket	26,106,516.00	10 Paket	16,082,688.00	10 Paket	15,000,000.00	10 Paket	20,000,000.00	40 Paket	77,189,204.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	100 Laporan	208,750,000.00	100 Laporan	244,080,000.00	100 Laporan	185,000,000.00	100 Laporan	200,000,000.00	400 Laporan	837,830,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis; Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**10 Orang**	**10 Orang**	**137,792,615.00**	**10 Orang**	**161,593,196.00**	**10 Orang**	**214,000,000.00**	**10 Orang**	**240,000,000.00**	**40 Orang**	**753,385,811.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Rekening	12 Laporan	12,992,615.00	12 Laporan	22,393,196.00	12 Laporan	30,000,000.00	12 Laporan	40,000,000.00	48 Laporan	105,385,811.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Orang	12 Laporan	124,800,000.00	12 Laporan	139,200,000.00	12 Laporan	184,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	48 Laporan	648,000,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**100 Persen**	**100 Persen**	**89,486,207.00**	**100 Persen**	**96,376,000.00**	**100 Persen**	**88,000,000.00**	**100 Persen**	**140,000,000.00**	**100 Persen**	**413,862,207.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	39,486,207.00	1 Unit	46,376,000.00	1 Unit	38,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	4 Unit	163,862,207.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Ruang	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**	**2,000,000,000.00**	**80,10** **24,04** **87,38`**	**2,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**86.70**					**94,47**	**1,000,000,000.00**	**97,07**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 50 Pustakawan 2. 40 Laboran 3. 100 tenaga pendidik 4. 75 Guru 5. 446 Kepala Sekolah 6. 120 orang Guru Penggerak 7. 50 orang Pendamping Praktik 8. 50 guru BK 9. 55 guru Ekonomi 10. 70 guru matematika 11. 70 guru fisika 12. 108 Guru yang mengikuti OGN 13. 55 guru bahasa inggris					480 orang	500,000,000.00	480 orang	500,000,000.00	960 orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02	**Program Pen`gelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77,29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**		**80,10** **24,04** **87,38`**				Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B**	**82.10**					**86.54**	**1,000,000,000.00**	**87.52**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 459 pendidik yang sudah mengikuti diklat asessor. 2. 98 Pendidik 3. 210 Pendidik					480 orang	500,000,000.00	480 orang	500,000,000.00	960 orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah II	Kota Dumai; Kabupaten Rokan Hilir; Bengkalis
		1.01.01.1.01.0003	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III**				**553,708,254.00**		**598,772,713.00**		**2,600,000,000.00**		**2,710,000,000.00**		**2,462,480,967.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.01.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang pendidikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**553,708,254.00**	**100 Persen**	**598,772,713.00**	**100 Persen**	**600,000,000.00**	**100 Persen**	**710,000,000.00**	**100 Persen**	**2,462,480,967.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**311,078,254.00**	**1 Dokumen**	**297,973,511.00**	**1 Dokumen**	**298,000,000.00**	**1 Dokumen**	**330,000,000.00**	**4 Dokumen**	**1,237,051,765.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Jenis	50 Paket	60,565,568.00	50 Paket	79,997,433.00	50 Paket	60,000,000.00	50 Paket	70,000,000.00	200 Paket	270,563,001.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	960 Porsi	960 Paket	33,082,996.00	960 Paket	37,996,600.00	960 Paket	38,000,000.00	960 Paket	40,000,000.00	3840 Paket	149,079,596.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	10 Paket	34,129,690.00	10 Paket	14,999,478.00	10 Paket	15,000,000.00	10 Paket	20,000,000.00	40 Paket	84,129,168.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	100 Laporan	183,300,000.00	100 Laporan	164,980,000.00	100 Laporan	185,000,000.00	100 Laporan	200,000,000.00	400 Laporan	733,280,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu; Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**13 Orang**	**13 Orang**	**159,070,000.00**	**13 Orang**	**212,799,952.00**	**13 Orang**	**214,000,000.00**	**13 Orang**	**240,000,000.00**	**52 Orang**	**825,869,952.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Rekening	12 Laporan	28,270,000.00	12 Laporan	29,999,952.00	12 Laporan	30,000,000.00	12 Laporan	40,000,000.00	48 Laporan	128,269,952.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Orang	12 Laporan	130,800,000.00	12 Laporan	182,800,000.00	12 Laporan	184,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	48 Laporan	697,600,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**100 Persen**	**100 Persen**	**83,560,000.00**	**100 Persen**	**87,999,250.00**	**100 Persen**	**88,000,000.00**	**100 Persen**	**140,000,000.00**	**100 Persen**	**399,559,250.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	33,560,000.00	1 Unit	37,999,250.00	1 Unit	38,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	4 Unit	149,559,250.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Ruang	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**	**2,000,000,000.00**	**80,10** **24,04** **87,38`**	**2,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**86.70**					**94.47**	**1,000,000,000.00**	**97,07**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 50 Pustakawan 2. 40 Laboran 3. 100 tenaga pendidik 4. 75 Guru 5. 446 Kepala Sekolah 6. 120 orang Guru Penggerak 7. 50 orang Pendamping Praktik 8. 50 guru BK 9. 55 guru Ekonomi 10. 70 guru matematika 11. 70 guru fisika 12. 108 Guru yang mengikuti OGN 13. 55 guru bahasa inggris					480 orang	500,000,000.00	480 orang	500,000,000.00	960 orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**		**80,10** **24,04** **87,38`**				Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B**	**82.10**					**86,54**	**1,000,000,000.00**	**87,52**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 459 pendidik yang sudah mengikuti diklat asessor. 2. 98 Pendidik 3. 210 Pendidik					480 orang	500,000,000.00	480 orang	500,000,000.00	960 orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah III	Kabupaten Kampar; Rokan Hulu
		1.01.01.1.01.0004	**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**				**536,092,377.00**		**599,996,955.00**		**2,600,000,000.00**		**2,710,000,000.00**		**2,446,089,332.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.01.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang pendidikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**536,092,377.00**	**100 Persen**	**599,996,955.00**	**100 Persen**	**600,000,000.00**	**100 Persen**	**710,000,000.00**	**100 Persen**	**2,446,089,332.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**294,607,161.00**	**1 Dokumen**	**306,009,507.00**	**1 Dokumen**	**298,000,000.00**	**1 Dokumen**	**330,000,000.00**	**4 Dokumen**	**1,228,616,668.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Jenis	50 Paket	63,010,555.00	50 Paket	63,191,473.00	50 Paket	60,000,000.00	50 Paket	70,000,000.00	200 Paket	256,202,028.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	960 Porsi	960 Paket	23,000,000.00	960 Paket	20,098,000.00	960 Paket	38,000,000.00	960 Paket	40,000,000.00	3840 Paket	121,098,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis	10 Paket	22,226,606.00	10 Paket	14,965,034.00	10 Paket	15,000,000.00	10 Paket	20,000,000.00	40 Paket	72,191,640.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	100 Laporan	186,370,000.00	100 Laporan	207,755,000.00	100 Laporan	185,000,000.00	100 Laporan	200,000,000.00	400 Laporan	779,125,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir; Kota Pekanbaru
		X.XX.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**14 Orang**	**14 Orang**	**145,786,216.00**	**14 Orang**	**209,159,995.00**	**14 Orang**	**214,000,000.00**	**14 Orang**	**240,000,000.00**	**56 Orang**	**808,946,211.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Rekening	12 Laporan	19,786,216.00	12 Laporan	25,159,995.00	12 Laporan	30,000,000.00	12 Laporan	40,000,000.00	48 Laporan	114,946,211.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang	12 Laporan	126,000,000.00	12 Laporan	184,000,000.00	12 Laporan	184,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	48 Laporan	694,000,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**100 Persen**	**100 Persen**	**95,699,000.00**	**100 Persen**	**84,827,453.00**	**100 Persen**	**88,000,000.00**	**100 Persen**	**140,000,000.00**	**100 Persen**	**408,526,453.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	45,699,000.00	1 Unit	34,827,453.00	1 Unit	38,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	4 Unit	158,526,453.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Ruang	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	4 Unit	250,000,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**	**2,000,000,000.00**	**80,10** **24,04** **87,38`**	**2,000,000,000.00**		**4,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Persentase SMA yang berakreditasi minimal B**	**86.70**					**94,47**	**1,000,000,000.00**	**97,07**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 50 Pustakawan 2. 40 Laboran 3. 100 tenaga pendidik 4. 75 Guru 5. 446 Kepala Sekolah 6. 120 orang Guru Penggerak 7. 50 orang Pendamping Praktik 8. 50 guru BK 9. 55 guru Ekonomi 10. 70 guru matematika 11. 70 guru fisika 12. 108 Guru yang mengikuti OGN 13. 55 guru bahasa inggris					480 Orang	500,000,000.00	480 Orang	500,000,000.00	960 Orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**Angka partisipasi sekolah** **Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan** **Persentase satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B**	**77.29** **NA** **85,00**					**80,03** **24,02** **86,88**		**80,10** **24,04** **87,38`**				Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02.1.02	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B**	**82.10**					**86,54**	**1,000,000,000.00**	**87,52**	**1,000,000,000.00**		**2,000,000,000.00**	Dinas Pendidikan	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang					3 ruang	500,000,000.00	3 ruang	500,000,000.00	6 ruang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1. 459 pendidik yang sudah mengikuti diklat asessor. 2. 98 Pendidik 3. 210 Pendidik					480 Orang	500,000,000.00	480 Orang	500,000,000.00	960 Orang	1,000,000,000.00	Cabdin Wilayah IV	Kabupaten Kuantan Singingi; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir
		JUMLAH					**2,297,389,778,114.00**		**2,347,396,702,086.00**		**2,390,951,472,600.00**		**2,371,085,155,188.00**		**9,389,773,107,988.00**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang sesuai tujuan dan sasaran RPJMD yang mengacu pada tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ditampilkan dalam Tabel 7.1.a indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebelum perubahan dan Tabel 7.1.b indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD setelah perubahan, sebagai berikut :

Tabel 7.1.a
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2020

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan		
1	Rata - rata Lama Sekolah	8,97	9,14
2	Harapan Lama Sekolah	13,57	13,20
	Sasaran		
1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (%)	85,26	84,61
2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C (%)	62,09	64,01
3	Persentase Sekolah yang berakreditasi minimal B	82,63	86,50
4	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	81,19
5	APK SD/MI/SDLB/Paket A	108,14	105,89
6	APM SD/MI/SDLB/Paket A	95,48	97,73
7	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	96,86	94,89
8	APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	73,97	80,48
9	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96,00

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun 2020	
		Target	Realisasi
10	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76
	Program		
1	APK SMA Sederajat	85,26	86,65
2	APM SMA Sederajat	67,17	66,81
3	Akreditasi sekolah SMA sederajat dengan nilai minimal b	82,63	86,50
4	Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan	NA	23,00
5	Menurunnya Angka Putus Sekolah	0,54	0,58
6	Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat pendidikan > D4/S1	162	74
7	Jumlah siswa miskin yang dibantu	1700	1,164
8	Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa	3,635	4,534

Tabel 7.1.b
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Tahun 2021-2024

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020*	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan							
1	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur > 25 tahun (Tahun)	9,03	9,14	9,19	9,24-9,30	9,29-9,35	9,35-9,40	9,35-9,40
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,14	13,20	13,28	13,37-13,47	13,44-13,53	13,44-13,60	13,44-13,60
	Sasaran							
3	APK SM Sederajat	82,54	84,61	88,90	90,40	91,90	92,40	92,40
4	APM SM Sederajat	63,55	64,01	64,00	66,36	67,88	68,00	68,00
5	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	1,34	0,76	0,94	0,74	0,73	0,70	0,70
6	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	92,92	93,32	93,71	94,12	94,52	94,92	94,92
	Program							
7	Angka Partisipasi Sekolah	77,29	77,42	77,81	79,90	80,03	80,10	80,10
8	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Akses Pendidikan	NA	23,00	23,98	24,00	24,02	24,04	24,04

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020*	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
9	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B	85.00	85,38	85,84	86,38	86,88	87,38	87,38
10	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
11	Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	58,00	59.00	-	-	65,00	70,00	70,00
12	Persentase Satuan Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang mengajukan perizinan terlayani	88,00	100	-	-	100	100	100

*) Data tidak menjadi penghitungan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD)

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan untuk Tahun 2023 dan 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian hasil pembangunan bidang Pendidikan dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan dapat terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga perubahan renstra yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ditetapkan dengan peraturan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disahkan Gubernur Riau.

Perubahan Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Provinsi Riau sekaligus sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

Akhir kata semoga Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pekanbaru, 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



M. JOB KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19750528 199412 1 001

FORMULASI PENGHITUNGAN PERUBAHAN PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
1	Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur > 25 tahun (Tahun)	Sumber Data BPS RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ Keterangan: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Sumber Data BPS HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS^t_a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E^t_i = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, …, n) FK = Faktor koreksi pesantren
3	APK SM Sederajat	Sumber Data BPS APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. $APKSM = \frac{a_3}{b_3} x100\%$ a3 : jumlah murid SM/sederajat b3 : jumlah penduduk usia 16-18 tahun Keterangan: a3 : jumlah murid SM/sederajat b3 : jumlah penduduk usia 16-18 tahun
4	APM SM Sederajat	Sumber Data BPS Untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh $\text{APM SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/sederajad usia } 16-18 \text{ tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun}} \text{x100\%}$

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Penjelasan/Formulasi Penghitungan
5	Angka Putus Sekolah SM Sederajat	Sumber Data BPS Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). $\text{APTS } 16-18 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \text{x}100\%$
6	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi	Sumber Data Kemendikbudristek $= \frac{\text{Jumlah Satdik Menengah dan Khusus Terakreditasi}}{\text{Seluruh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus}} \; x\; 100$
7	Angka Partisipasi Sekolah	Sumber Data BPS Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan $\text{APS } 16-18 \text{ tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia } 16-18 \text{ tahun}} \times 100\%$
8	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Akses Pendidikan	Sumber Data Kemendikbudristek $= \frac{\text{Anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses Pendidikan}}{\text{Anak berkebutuhan khusus}} \; x\; 100$
9	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B	Sumber Data Kemendikbudristek $= \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Terakreditasi Minimal B}}{\text{Seluruh Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus}}$
10	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Sumber Data Dinas Pendidikan Prov. Riau $= \frac{\text{Jlh Satdik Menengah \& Khusus yang Menerapkan Kurikulum Mulok}}{\textit{Seluruh Satuan Pendidikan Menengah \& Khusus}} \; x\; 100$
11	Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Sumber Data Kemendikbudristek $= \frac{\textit{Jumlah Pendidik \& Tendik Menengah}}{\text{Jumlah Peserta Didik Menengah}} \; x\; 100$
12	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang mengajukan perizinan terlayani	Sumber Data Dinas Pendidikan Provinsi Riau $= \frac{\textit{Satdik Menengah dan Khusus yang Mengajukan Perizinan terlayani}}{\textit{Satdik Menengah dan Khusus yang Mengajukan Perizinan}} \; x\; 100$

KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
NOMENKLATUR	**INDIKATOR**	**FORMULASI**	**NOMENKLATUR**	**INDIKATOR**	**FORMULASI**
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase SMA yang berakreditasi minimal B	$= \frac{\textbf{Total SMA yang berakreditasi B + A}}{\textbf{Total SMA}}$ **X 100**	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Total Sekolah Baru yang Telah Dibangun
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Total Ruang Kelas Baru yang Bertambah
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Total Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Total Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	Total Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Total Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Total Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	Total Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Total Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Total Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Total Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Total Asrama Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Total Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun : -Jalan Lingkungan Sekolah -Musholla -Pagar -Lapangan Upacara -Paving Block -Toilet -Sumur Bor -Turab - Parkir - Gapura - Landscape -dan Jenis Bangunan Lainnya
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Total Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Total Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Total Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Total Mebel yang diadakan: -Ruang Kelas dan ruang laboratorium : meja dan kursi siswa,meja dan kursi guru,lemari,papan tulis -Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU : meja dan kursi guru,lemari -Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah : Meja kursi Rumah, tempat tidur,lemari,sofa. -Asrama :Meja Belajar dan kursi belajar siswa, tempat tidur,meja makan dan kursi makan,lemari,sofa.
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Total Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Total Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Total perlengkapan Sekolah yang Tersedia
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Total Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Total Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Total Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Total Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Total Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Total Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Total Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase SMK yang berakreditasi Minimal B	$= \frac{\textbf{Total SMK yang berakreditasi B + A}}{\textbf{Total SMK}}$ **X 100**	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Total Sekolah Baru yang Telah Dibangun
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Total Ruang Kelas Baru yang Bertambah
			Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Total Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Total Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Total Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Total Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Total Asrama Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Total Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun : -Jalan Lingkungan Sekolah -Musholla -Pagar -Lapangan Upacara -Paving Block -Toilet -Sumur Bor -Turab - Parkir - Gapura - Landscape -dan Jenis Bangunan Lainnya
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi

NOMENKLATUR	INDIKATOR	FORMULASI	NOMENKLATUR	INDIKATOR	FORMULASI
			Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Total Mebel yang diadakan: -Ruang Kelas dan ruang laboratorium : meja dan kursi siswa,meja dan kursi guru,lemari,papan tulis -Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU : meja dan kursi guru,lemari -Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah : Meja kursi Rumah, tempat tidur,lemari,sofa. -Asrama :Meja Belajar dan kursi belajar siswa, tempat tidur,meja makan dan kursi makan,lemari,sofa.
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Total Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Total perlengkapan Sekolah yang Tersedia
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Total Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Total Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
			Penyelenqaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Total Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Total Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Total Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Total Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Total Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase sekolah pendidikan khusus yang terakreditasi minimal B	$= \frac{\text{Total SLB yang berakreditasi B + A}}{\text{Total SLB}} \text{ X } 100$	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Total Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Total Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Total Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Total Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Total Asrama Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Total Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun : -Jalan Lingkungan Sekolah -Musholla -Pagar -Lapangan Upacara -Paving Block -Toilet -Sumur Bor -Turab - Parkir - Gapura - Landscape -dan Jenis Bangunan Lainnya
			Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Total Kantin Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Total Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Total Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Total Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun
			Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Total Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Total Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Total Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi
			Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Total Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Total Mebel yang diadakan: -Ruang Kelas dan ruang laboratorium : meja dan kursi siswa,meja dan kursi guru,lemari,papan tulis -Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU : meja dan kursi guru,lemari -Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah : Meja kursi Rumah, tempat tidur,lemari,sofa. -Asrama :Meja Belajar dan kursi belajar siswa, tempat tidur,meja makan dan kursi makan,lemari,sofa.
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Total Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Total Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Total Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Total Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Total Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Total Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Total Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Total Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Total Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan pada satuan pendidikan menengah	Total kurikulum muatan lokal yang diimplementasikan pada satuan pendidikan menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Total Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya
Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terpenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Total Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang terpenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Total Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Total Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

NOMENKLATUR	INDIKATOR	FORMULASI	NOMENKLATUR	INDIKATOR	FORMULASI
Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Total pertimbangan teknis perizinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Total Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Total Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah pertimbangan teknis perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Total pertimbangan teknis perizinan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Total Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Total Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Total Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Total Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Total Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	$= \frac{\text{Total Administrasi Keuangan yang Diminta}}{\text{Total Administrasi Keuangan yang Terlayani}}$ X 100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Total Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Total dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD**	$= \frac{\text{Total Pengadaan / Pembangunan BMD yang teradministrasi}}{\text{Total Pengadaan / Pembangunan BMD}}$ X 100	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Total Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**Total Dokumen Barang Milik Daerah**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Total Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Total Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Total Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Total Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Total Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Disediakan**	**Total Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Yang Disediakan**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Total Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah PNS dan Non PNS yang dilayani**	**Total PNS dan Non PNS yang dilayani**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Total Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Total Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Total Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah yang di pelihara**	$= \frac{\text{Total Sarpras BMD yang Rusak}}{\text{Total Sarpras BMD yang Dipelihara}}$ X 100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Total Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Total Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Total Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Total Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi